



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Di dalam Instruksi Presiden tersebut, diamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Selanjutnya, sesuai pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Satuan Kerja



Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Secara umum prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut :

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran,
APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan.
2. Disiplin anggaran,
Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan anggaran,
Pengalokasian anggaran secara adil sehingga dapat mengakomodir dinamika dan kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. Efisiensi dan efektifitas anggaran,
Anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.
5. Disusun dengan pendekatan kinerja,
APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil (output dan outcome) atas alokasi biaya atau masukan/input yang ditetapkan.

Prinsip penganggaran ini dapat dicapai, apabila kinerja pembangunan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon sebagai organisasi unsur staf bekerja sama dan saling mendukung mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan serta dilaksanakan dan disusun sesuai ketentuan normatif. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas



keberhasilan atau kegagalan perwujudan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penetapan Indikator Kerja Utama (IKU) Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.6);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 1, Seri D);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2021 Seri D);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nomor 48 Tahun 2021 Seri D).

1.3. Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan



Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Maka Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang keuangan dan barang milik daerah;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana anggaran daerah;
- c. pengoordinasian dan pengelolaan perbendaharaan daerah;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. pengelolaan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;
- g. pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang keuangan dan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan administrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

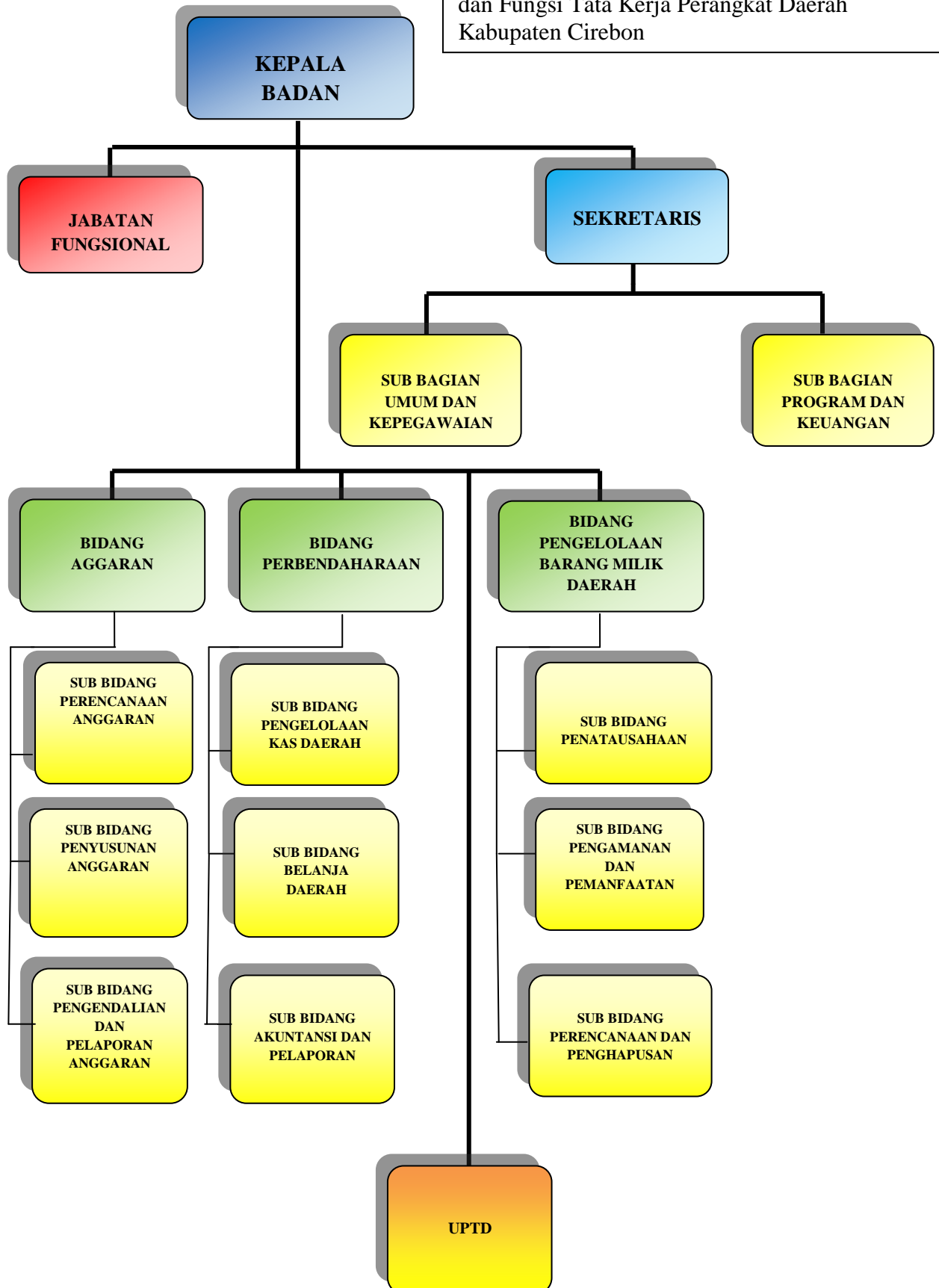
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan.



- c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1). Subbidang Perencanaan Anggaran;
 - 2). Subbidang Penyusunan Anggaran;
 - 3). Subbidang Pengendalian dan Pelaporan Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - 1). Subbidang Belanja Daerah;
 - 2). Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - 3). Subbidang Akuntansi dan Pelaporan.
- e). Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas :
 - 1). Subbidang Perencanaan dan Penghapusan;
 - 2). Subbidang Penatausahaan;
 - 3). Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon





Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh jumlah pegawai, dengan jumlah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas PNS (Gol I s/d IV) dan pegawai honorer sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat

No.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat			
	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah (org)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda /IVc	-		-
2.	Pembina Tingkat / IV b	1	-	1
3.	Pembina / IV a	3	1	4
4.	Penata Tingkat I / III d	3	-	7
5.	Penata / III c	5	2	7
6.	Penata Muda Tk I / III b	7	4	11
7.	Penata Muda / III a	6	3	9
8.	Pengatur Tk I/ II d	1	-	1
9.	Pengatur / II c	4	3	7
10.	Pengatur Muda Tk I / II.b	1	-	1
10.	Honorer	15	6	21
	JUMLAH	51	17	68

Sumber : Sekretariat BKAD Kabupaten Cirebon, bulan Desember 2021



Tabel 2.2
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin			
	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah (org)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretariat	9	4	13
3.	Bidang Anggaran	11	1	12
4.	Bidang Perbendaharaan	10	7	17
5.	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	17	8	15
	JUMLAH	48	20	68

Sumber : Sekretariat BKAD Kabupaten Cirebon, Desember 2021

Dalam rangka menunjang kompetensi dalam pelaksanaan tugas, Sumber Daya Manusia Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon didukung oleh Aparatur Sipil Negara dengan latar belakang pendidikan yang terdiri atas :

Tabel 2.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Pendidikan

No.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan											
	Pegawai pada	Pendidikan										Jumlah
		S3	S2	S1	D-IV	D-III	D-II	D-I	SMA	SMP	SD	
1.	Kepala Badan			1								1
2.	Sekretariat		3	8		1			2			14
3.	Bidang Anggaran		2	10		1						13
4.	Bidang Perbendaharaan		2	13					2			17
5.	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah		2	19		1			1			23
	JUMLAH		9	51		3			5			68

Sumber : Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon bulan Desember 2021



1.4. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Dalam menentukan isu - isu strategis ditempuh melalui metode forum *Focussed Group Discussion (FGD)* dengan dihadiri oleh para *stakeholder*. Isu strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Minimnya penerimaan sumber pendapatan daerah berpengaruh pada kebijakan pengalokasian pendanaan pada SKPD;
2. Konsistensi/keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran (RPJMD, Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA/RKPA dan DPA/DPPA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD masih lemah;
3. Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
4. Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di SKPD;
5. Belum tertibnya bendahara penerimaan SKPD penghasil dalam menginput data dalam penerimaan secara tepat waktu;
6. Lemahnya adaptasi Pejabat Pengelola Keuangan SKPD terhadap transformasi peraturan perundangan-undangan dan dinamikanya;
7. Pencatatan akuntansi pada SKPD masih belum maksimal;
8. Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi;
9. Kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon masih terbatas;
10. Perlu adanya pembaharuan peraturan tentang pemanfaatan dan pengamanan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
11. Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap SKPD;



12. Pengelolaan aset dan barang daerah belum berjalan optimal dalam upaya menghasilkan sistem informasi pengelolaan barang daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
13. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan aset daerah masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas personil sangat tinggi;
14. Persentase tanah aset daerah yang sudah bersertifikat masih sangat kecil. Kondisi tersebut terjadi kurang lebih masih banyak tanah dan bangunan yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Cirebon tetapi tidak didukung/belum didukung data yang otentik sehingga diperlukan penelusuran dan identifikasi aset sebelum melakukan pendaftaran ke BPN untuk proses sertifikasi/status hukum asetnya;
15. Ketepatan penyampaian laporan aset dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) SKPD belum maksimal dan tepat waktu;
16. Lemahnya proses pengawasan aset dari aspek pemeliharaan pengawasan maupun dokumentasi bukti kepemilikan;
17. Lemahnya adaptasi Pejabat Pengelola Keuangan SKPD terhadap transformasi peraturan perundangan - undangan dan dinamikanya;
18. Mekanisme / Sistem pengelolaan keuangan daerah masih belum tertata dalam satu sistem yang terpadu sebagai upaya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan deskripsi mengenai pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi, analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah kesenjangan kinerja (*performance*



gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang dengan pola pikir seperti itu.

Adapun Sistematika Penyajian adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program serta kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon. Penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam Renstra tersebut, ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :



1. Visi dan Misi

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon yang berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Cirebon yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 yaitu : **“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”**.

Sejalan dengan Visi di atas, maka ada 5 (lima) Misi Utama yang akan dijalankan, yaitu :

1. Kabupaten Cirebon **BERBUDAYA** :
Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai – nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
2. Kabupaten Cirebon **SEJAHTERA** :
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
3. Kabupaten Cirebon **AGAMIS** :
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.
4. **Kabupaten Cirebon MAJU** :
Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di Pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
5. Kabupaten Cirebon **AMAN** :
Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.



Yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Misi Keempat : **Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di Pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.**

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi Keuangan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku
- Tujuan 2 : Terwujudnya Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Kompeten

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon dalam jangka waktu lima tahun mendatang.



Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Cirebon Tahun 2019 –2024 adalah :

- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- Sasaran 2 : Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan
- Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah strategi dan kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangkamenengah Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara Badan Keuangan dan Aset Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah bagi setiap program prioritas.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan				
				Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Menjaga konsistensi/keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran (RPJMD, Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA/RKPA dan DPA/DPPA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD	Peningkatan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon	√	√	√	√	√
		Mengoptimalkan fungsi teknologi informasi secara online dan berbasis web	Peningkatan pengelolaan dan pengolahan data base keuangan dan barang daerah	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung program kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah	Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana yang ada guna menunjang program dan kegiatan yang telah ditetapkan	√	√	√	√	√
		Melakukan update aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang	Peningkatan aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan melakukan pemeliharaan secara berkala	√	√	√	√	√
		Melakukan pembinaan/sosialisasi bagi pegawai diseluruh SKPD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah dengan melaksanakan pembinaan/ sosialisasi secara berkala	√	√	√	√	√
		Melakukan pengelolaan administrasi kas berupa penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana serta penerbitan SP2D bagi SKPD se Kab. Cirebon	Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran	√	√	√	√	√
		Melakukan rekonsiliasi secara langsung dan monitoring/evaluasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada SKPD	Penyusunan laporan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual	√	√	√	√	√



	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Melakukan inventarisasi dan pemetaan aset daerah	Peningkatan validasi pengelolaan data aset	√	√	√	√	√
Terwujudnya Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Kompeten	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Melakukan inventarisasi dan penerapan SOP, standar pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi/aplikasi yang terintegrasi, dan penerapan citizen charter/maklumat pelayanan serta perjanjian kinerja menuju kawasan bebas korupsi	Peningkatan standar kualitas pelayanan BKAD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan	√	√	√	√	√

4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah . Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021 adalah :

a) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator :

1. Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk



mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;

4. Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan :

- 1, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan : Administrasi Umum

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Bahan/Material
8. Fasilitas Kunjungan Tamu
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b) PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Indikator :

1. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola keuangan daerah;
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap;
3. Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD;
4. Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD;
5. Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran.
6. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP.

Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan KUA dan PPAS
2. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD



4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5. Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
8. Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
12. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
13. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
14. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
4. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank



6. Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
7. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas
8. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
9. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
10. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
6. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



7. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
8. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
9. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
10. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

c) PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Indikator :

1. Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar;
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap;
3. Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD;
4. Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik/benar;
5. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola barang daerah.

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Standar Harga
2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
4. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah
6. Inventarisasi Barang Milik Daerah



7. Pengamanan Barang Milik Daerah
8. Penilaian Barang Milik Daerah
9. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
11. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
12. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
13. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

2.2. Pengertian Indikator Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif



dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

2.3. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja instansi yang bersangkutan yaitu :

1. Spesifik;
2. Dapat dicapai;
3. Relevan;
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan data statistik pemerintah;



5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2019-2024**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku		Peningkatan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
			Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah		Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen
			Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
			Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
			Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu penyelesaian SP2D	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
			Peningkatan kualitas dan	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen



			ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP								
		Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi	39,73 Prosen	49,73 Prosen	59,71 Prosen	69,78 Prosen	69,90 Prosen	84,47 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
			Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
2		Terwujudnya Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Kompeten	Tingkat pencapaian kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
		Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	75,00 Poin	78,00 Poin	80,00 Poin	80,00 Poin	80,50 Poin	80,50 Poin	82,00 Poin	82,00 Poin

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.



Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).



Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai eselon II, eselon III, sampai dengan eselon IV.

Dalam upaya mendukung pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah tersebut maka pada Tahun 2021 telah ditentukan sasaran dan indikator sasaran strategis yang ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel Perencanaan Kinerja Perubahan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact/ Dampak)	Satuan	Sumber Data	Target Kinerja
4.1	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah			
4.1.1	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya	Prosen	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100
		Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD	Prosen	Nota Keuangan	100
		Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Prosen	Nota Keuangan	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D	Prosen	SPP/SPM, SP2D dan Rekon LRA Belanja	100
		Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP	Prosen	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100
4.1.2	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi	Prosen	Kartu Inventaris Barang	69,78
		Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya	Prosen	Kartu Inventaris Barang	100
4.2	Terwujudnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Kompeten	Tingkat pencapaian kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Prosen	Laporan dan Sistem AKIP SKPD	100
4.2.1	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Poin	Laporan Hasil Survey IP/IKM	80



**Tabel Penetapan Kinerja Perubahan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021**

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Satuan	Sumber Data	Target Kinerja	Unit Kerja Penanggungjawab
4.1	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah				
4.1.1	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya	Prosen	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD	Prosen	Nota Keuangan	100	Bidang Anggaran
		Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Prosen	Nota Keuangan	100	Bidang Anggaran
		Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D	Prosen	SPP/SPM, SP2D dan Rekon LRA Belanja	100	Bidang Perbendaharaan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP	Prosen	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	Bidang Perbendaharaan
4.1.2	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi	Prosen	Kartu Inventaris Barang	69,78	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya	Prosen	Kartu Inventaris Barang	100	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.2	Terwujudnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Kompeten	Tingkat pencapaian kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah				
4.2.1	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Poin	Laporan Hasil Survey IP/IKM	80	Sekretariat

Sementara dengan keterkaitan antara sasaran, program dan indikator program jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :



Tabel Program dan Indikator
Badan Keuangan dan Daerah
Tahun 2021

No	Program	Indikator		Tahun 2021
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	(1)	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100%
		(2)	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100%
		(3)	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100%
		(4)	Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100%
		(5)	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100%
		(6)	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	(1)	Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD	100%
		(2)	Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	100%
		(3)	Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran	100%
		(4)	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP	100%
		(5)	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan dan laporan aset	100%
		(6)	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola keuangan daerah	100%
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	(1)	Peningkatan penyajian laporan Barang Milik Daerah yang sudah terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik dan benar	100%
		(2)	Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik/benar	100%
		(3)	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola barang milik daerah	100%
		(4)	Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD	100%



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah yang mengelola APBD berdasarkan suatu sistem akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, akuntabilitas pada hakekatnya juga merupakan salah satu faktor penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan hasil dalam rangka menjawab tuntutan kinerja pemerintahan dengan mengacu pada dinamika dan kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah sebagai pelaku utama dalam menjalankan fungsi regulasi melalui proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan diharapkan untuk lebih transparan dan clean governance . Penilaian kinerja juga tidak terlepas dari kegiatan mengolah input menjadi output dan outcome yang diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mempunyai manfaat serta dampak yang lebih luas dan lebih baik kepada masyarakat.

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan triwulan III (tiga) untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 – 2024, dan dituangkan lebih lanjut pada dokumen



Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan Tahun 2021. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RENSTRA);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional (**jika ada**);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :



- a. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.
- b. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- c. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran
- d. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
 - 100 keatas = Target Tercapai
 - Dibawah 100 = Target Tidak Tercapai

Atau

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70 s/d < 85 : Berhasil

55 s/d < 70 : Cukup Berhasil

0 s/d < 55 : Kurang Berhasil

Evaluasi dan analisis kinerja lebih difokuskan pada pencapaian kinerja yang bernilai > 100 % dijelaskan Penyebab dan solusi dan strategi pemecahan masalahnya.

Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Dalam RPJMD Tahun 2019–2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah bertanggungjawab memberikan kontribusi terhadap pencapaian misi Bupati Cirebon yang nomor empat yaitu *Meningkatnya Produktifitas*



Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Oleh Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah. Kontribusi tersebut ditandai dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan adalah :

1. Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah;
2. Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD;
3. Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D;
5. Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi;
6. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021 menghasilkan realisasi keseluruhan anggaran sebesar **Rp.17.042.105.223,00** atau **90,97%**, dari total anggaran sebesar **Rp.18.734.039.655,00**. Adapun realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagaimana pada tabel berikut :



Dibawah ini menyajikan data pencapaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (Perubahan) dan Sasaran Strategis yang ditabulasikan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;

Tabel. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Pencapaian Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
			Tercapai	Tidak Tercapai
Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah				
(IKK/IKU)-Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya (Non Kumulatif	100 Prosen	100 Prosen	Tercapai	
(IKK/IKU)-Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD (Non Kumulatif)	100 Prosen	100 Prosen	Tercapai	
(IKK/IKU)-Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD (Non Kumulatif)	100 Prosen	100 Prosen	Tercapai	
IKK/IKU)-Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D (Non Kumulatif	100 Prosen	100 Prosen	Tercapai	
(IKK/IKU)-Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP (Non Kumulatif)	100 Prosen	100 Prosen	Tercapai	
Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan				
(IKK/IKU)-Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi (Non Kumulatif)	69,78 Prosen	53,25 Prosen		Tidak Tercapai
(IKK/IKU)-Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya (Non Kumulatif)	100 Prosen	100 Prosen	Tercapai	
Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah				
(IKK/IKU)-Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah (Non Kumulatif)	80 Poin	80 Poin	Tercapai	



Dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dan menyajikan :

- a. Laporan Keuangan; dan
- b. Laporan Kinerja.

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah menyampaikan kepada Bupati. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan disusun



dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan terdiri atas :

- I. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD), terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- II. Entitas Pelaporan (SK-PKD) terdiri atas :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Manfaat penggunaan basis akuntansi akrual bagi Pemerintah Daerah antara lain :

- 1) Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- 3) Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya Pemerintah Daerah lebih baik;
- 4) Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Laporan Keuangan Interim dapat disusun untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mengetahui besarnya realisasi anggaran sampai periode tertentu, mengetahui posisi keuangan atas aset, kewajiban dan ekuitas entitas pelaporan pada suatu waktu cut off penyusunan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan interim Pemerintah Daerah juga sebagai alat evaluasi manajemen terhadap sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, apakah telah menyajikan informasi keuangan secara akurat sesuai transaksi yang diinput dalam bentuk buku jurnal. Apabila terdapat perbedaan antara transaksi yang diinput dan informasi keuangan yang dihasilkan, akan dapat segera dilakukan perbaikan dan koreksi sehingga laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Buku dapat disajikan secara wajar. Langkah dan upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada SAP Berbasis Akrual Tahun 2021 antara lain :

1. Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual dari basis akuntansi kas menuju basis akuntansi akrual;



2. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Berbasis Akrua;l;
3. Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Interim SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, capaian indikator kinerja Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian dapat **“tercapai”** Namun demikian secara kualitas persentase Penyajian Laporan Keuangan SKPD Yang Mendukung Opini BPK RI dapat dipertanggungjawabkan, melalui pendampingan asistensi penyusunan Laporan Keuangan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Sehingga dapat dianggap seluruh Entitas Akuntansi (Pegguna Anggaran/Pegguna Barang/SKPD) sebanyak 73 SKPD, yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan telah dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD secara wajar sesuai SAP berbasis akrual. Oleh karena itu, capaian kinerja Indikator Utama (IKU) perubahan pada sasaran **“Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya”** sampai dengan Tahun 2021 telah tercapai 100,00% yaitu telah disampaikan dokumen LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2020 baik unaudited maupun audited yang merupakan laporan konsolidasian 73 SKPD sebelum tanggal 31 Maret 2021. Opini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari :



1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Arus Kas (LAK);
3. Neraca;
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
5. Laporan Operasional (LO);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yaitu standar yang mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari saji material. Suatu pemeriksaan meliputi :

- 1) Bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 2) Penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- 3) Penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan;
- 4) Penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan; serta
- 5) Penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip



akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria :

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Meskipun Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhasil meraih capaian opini atas Laporan Keuangan yang cukup baik, namun diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan perbaikan yang terus menerus untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pada Laporan Keuangan melalui antara lain:

- a. Peningkatan komitmen pimpinan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual;
- b. Menyempurnakan peraturan terkait kebijakan akuntansi dan mengembangkan aplikasi secara menyeluruh dan terintegrasi;
- c. Peningkatan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi;
- d. Peningkatan sinergi antar unit terkait;
- e. Percepatan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
- f. Pemberdayaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) secara optimal mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas APBN/APBD dalam rangka mewujudkan efektivitas pengendalian intern yang memadai.



2. Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Berdasarkan Pasal 104 dan Pasal 105 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum terkait penyampaian dan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.
- b. Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Berdasarkan Pasal 106 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019,



ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- b. Berdasarkan persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.
- c. DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD. Indikator Utama (IKU) perubahan pada sasaran ***“Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD”*** sampai dengan Tahun Anggaran 2021 penetapannya untuk APBD Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2021 sesuai jadwal yang telah ditentukan dan tepat waktu sehingga capaiannya 100,00%.

3. Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD

Indikator Utama (IKU) perubahan pada sasaran ***“Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD”*** sampai dengan Tahun Anggaran 2021 mengalami sedikit keterlambatan. Hantaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 baru dihantarkan tanggal 24 September 2021 dan disetujui oleh DPRD pada tanggal 30 September 2021. Penetapan APBD perubahan setelah selesai dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 Oktober 2021. Sehingga dalam menentukan target dan realisasi capaian sasaran Indikator Utama (IKU) perubahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah bulan



Oktober 2021 untuk target capaian dan realisasinya pada bulan tersebut juga sehingga capainnya sampai dengan Tahun 2021 sebesar 100,00%.

4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut :

- a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk :
 1. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 2. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 3. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 4. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.



5. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila :

- i. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
- ii. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
- iii. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Target dan realisasi capaian Indikator Utama (IKU) perubahan pada sasaran ***“Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D”*** sebesar 100,00% dikarenakan proses penyerapan anggaran 73 SKPD setiap waktu dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencairannya paling lama 2 hari dari tanggal ajuan SPP/SPM. Dalam pelaksanaannya Badan Keuangan dan Aset Daerah menggunakan aplikasi Verifikasi SPM dan SIKATON untuk mempercepat proses verifikasi ajuan dari SKPD.

5. Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi

Target dari indikator Indikator Utama (IKU) perubahan pada sasaran ***“Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi”*** sebesar 69,78% atau 125 ajuan tanah yang akan disertifikatan ditambah 616 yang sudah bersertifikat. Tahun 2021 Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sudah didaftarkan dan lengkap berkasnya ke BPN sebanyak 97 bidang Sehingga capaiannya sebesar 53,25% atau dari 1339 bidang yang baru bersertikat sebanyak 713 (616 bidang + 97 bidang). Sehingga capaiannya tidak tercapai 100,00%, hal ini dikarenakan Dokumen kepemilikan awal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Cirebon kurang/tidak lengkap untuk proses pensertifikatan tanah.



6. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Cirebon. Oleh sebab itu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon harus mampu melayani dan berkerja secara profesional, di sisi lain sebagai Pengelola dan sebagai Pengadministrasian di bidang Keuangan dan Aset Daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala yaitu dengan mengadakan survey kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Pemilihan sampel yang tepat, dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang dalam masyarakat. Diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan. Bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan selain dengan wawancara langsung yaitu dengan menyebarkan kuisisioner kepada penerima layanan yaitu seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, masyarakat umum yang memanfaatkan layanan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 (sembilan) unsur yang "relevan", "valid" dan "reliabel", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:



1. **Persyaratan Pelayanan**, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. **Prosedur Pelayanan**, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. **Waktu Pelayanan**, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. **Biaya/Tarif**, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**, adalah hasil pelayanan yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini adalah hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. **Kompetensi Pelaksana**, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;
7. **Perilaku Pelaksana**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. **Penanganan Pengaduan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. **Sarana dan prasarana**, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak.



Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan pada unit pelayanan :

- a) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BelanjaLangsung;
- b) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung;
- c) Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
- d) Rekonsiliasi dan Konsolidasi Belanja Laporan Keuangan SKPD;
- e) Rekonsiliasi dan Konsolidasi Pendapatan Laporan Keuangan SKPD;
- f) Rekonsiliasi Aset;
- g) Penjualan Barang Milik Daerah (BMD);
- h) Pemusnahan Barang Milik Daerah (BMD) Rusak Berat;
- i) Penetapan Status PenggunaanBarang Milik Daerah (BMD);
- j) Pengalihan Status PenggunaanBarang Milik Daerah (BMD);
- k) Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Rusak Berat;
- l) Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD;
- m) Rekonsiliasi Persediaan;
- n) Pinjam Pakai BMD pada Pengelola.

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan tersebut di atas, dilakukan pada periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 dan Bulan Juli 2021 sampai dengan Nopember 2021 dengan mengedarkan kuesioner kepada responden 73 (tujuh puluh tiga) OPD yang menjadi pengguna layanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dalam bahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Secara umum kualitas pelayanan dalam unit pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dipersepsikan **“Baik”**



oleh penggunaanya. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) semester II yang diperoleh berkisar di antara 62,51 – 81,25. Nilai SKM yang diperoleh dari 9 (sembilan) unsur pelayanan adalah;

2. Nilai rata – rata indeks hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) semester I 80,487 dan II 80,805 dibagi 2 adalah **80,646** atau nilai intervalnya semester I 3,219 dan semester II 3,232 dibagi 2 adalah **3,226** dengan kategori **“Memuaskan.”** Sehingga capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan pada sasaran ***“Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah”*** Tahun 2021 tercapai 100,00% dari target 80,00 Poin dengan realisasi sebesar 80,487 Poin.

7. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP

Indikator sasaran **“Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP”** merupakan indikator baru dari indikator sasaran lama yaitu ***“Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya”*** yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan yaitu pada Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang sebelumnya masuk dalam Bidang Pengelolaan Aset dan Akuntansi. Dikarenakan adanya perubahan nomenklatur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang terjadi perubahannya dan harus dilaksanakan pada bulan september 2021 sehingga harus mereview kembali Renstra. Indikator tersebut sebenarnya sudah dicapai 100,00% yaitu telah disampaikan dokumen LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2020 baik unaudited maupun audited yang merupakan laporan konsolidasian 73 SKPD sebelum tanggal 31 Maret 2021.



Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Arus Kas (LAK);
3. Neraca;
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
5. Laporan Operasional (LO);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria :

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

8. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya

Indikator sasaran **“Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya”** merupakan indikator baru dari indikator sasaran lama yaitu **“Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya”** yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sebelumnya masuk dalam Bidang Pengelolaaan Aset dan Akuntansi. Dikarenakan adanya perubahan nomenklatur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang terjadi perubahannya dan harus dilaksanakan pada bulan september 2021 sehingga harus mereview kembali Renstra. Indikator tersebut sebenarnya sudah dicapai 100,00% yaitu telah disampaikan dokumen LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2020 baik unaudited maupun audited yang merupakan laporan konsolidasian 73 SKPD sebelum tanggal



31 Maret 2021. Dalam LKPD telah memuat laporan barang milik daerah 73 SKPD yang telah dikonsolidasikan keberadaan asetnya, kelengkapan bukti dan nilai aset tersebut dan dapat diyakini kewajarannya serta tepat waktu dalam penyajiannya.

Tabel. 3
Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pencapaian Kinerja Tahun 2021

No.	BIDANG/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	SEKRETARIAT							
A.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah			9.995.352.510,00		9.274.992.148,00		92,79
		(IKK/IKU)- Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	80,00		80,00		100,00	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100,00	9.995.352.510,00	93,64	9.274.992.148,00	93,64	92,79



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,00	148.778.770,00	100,00	146.746.150,00	100,00	98,63
		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,00	251.222.030,00	81,82	225.964.251,00	81,82	89,95
		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,00	7.426.143.000,00	100,00	6.882.107.191,00	100,00	92,67
		Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,00	37.425.000,00	100,00	31.050.000,00	100,00	83,64



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,00	1.089.821.960,00	100,00	1.019.982.809,00	100,00	93,59
		Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100,00	1.042.261.750,00	80,00	969.141.747,00	80,00	92,98
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			148.778.770,00		146.746.150,00		98,63
		Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1,00		1,00		100,00	
	Sub Kegiatan :							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.712.150,00		11.680.400,00		99,73
		Jumlah Dokumen Renstra, Review Renstra, Renja dan Perubahan RenjaSKPD yang Diselesaikan	4,00		4,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD			5.321.830,00		5.273.700,00		99,10
		<i>Jumlah Dokumen Pra RKA, RKA Hantaran, RKAPersetujuan dan RKA Penetapan SKPD yang diselesaikan</i>	<i>4,00</i>		<i>4,00</i>		<i>100,00</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			5.321.830,00		5.273.700,00		99,10
		<i>Jumlah Dokumen RKAP Hantaran, RKAP Persetujuan, RKAP Penetapan dan RKAP Parsial SKPD yang diselesaikan</i>	<i>4,00</i>		<i>4,00</i>		<i>100,00</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD			3.583.770,00		3.555.900,00		99,20
		<i>Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD yang diselesaikan</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		<i>100,00</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD			3.918.460,00		3.886.700,00		99,19
		<i>Jumlah Dokumen DPAP Parsial dan DPAP Reguler SKPD yang diselesaikan</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>		<i>100,00</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.959.220,00		5.958.400,00		99,99



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah laporan capaian kinerja kegiatan, program, sasaran bulanan dan triwulanan SKPD yang diselesaikan</i>	4,00		4,00		100,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			112.961.510,00		111.117.350,00		98,37
		<i>Jumlah Dokumen LKPJ/LPPD, LKIP, IKU Perkin, RKT, PMPRB, SPIP, SP/IKM dan Renaksi KPK SKPD yang diselesaikan</i>	8,00		8,00		100,00	
		<i>Jumlah Sertifikat ISO yang Diperoleh Terhadap SOP atau Jenis Pelayanan yang Dijamin</i>	1,00		1,00		100,00	
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.442.772.570,00		6.898.534.991,00		92,69
		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan</i>	1,00		1,00		100,00	
	Sub Kegiatan :							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.426.143.000,00		6.882.107.191,00		92,67
		<i>Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangan setiap bulan</i>	50,00		50,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.998.070,00		1.927.700,00		96,48
		<i>Jumlah dokumen pengajuan SPP dan penerbitan SPMUP, LS, GU/TU serta gaji yang dicek kelengkapannya</i>	<i>4,00</i>		<i>4,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah dokumen SPJ BP/BPP SKPD yang telah diverifikasi dan di sahkan</i>	<i>6,00</i>		<i>6,00</i>		<i>100,00</i>	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			2.325.760,00		2.255.600,00		96,98
		<i>Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD(Neraca, LO, LPE dan BAR Validasi Akun)</i>	<i>4,00</i>		<i>4,00</i>		<i>100,00</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			9.852.900,00		9.803.800,00		99,50
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Diselesaikan</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		<i>100,00</i>	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00		0,00		0,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari auditor internal dan eksternal yang telah diterima oleh SKPD</i>	2,00		0,00		0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD			2.452.840,00		2.440.700,00		99,51
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD yang Diselesaikan</i>	1,00		1,00		100,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		0,00		0,00
	<i>Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang Diselesaikan</i>	<i>Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang Diselesaikan</i>	1,00		0,00		0,00	
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			234.592.460,00		209.536.451,00		89,32
		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah</i>	1,00		1,00		100,00	
	Sub Kegiatan :							



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1.094.260,00		1.081.850,00		98,87
		<i>Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang telah diselesaikan</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		<i>100,00</i>	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			230.500.000,00		205.500.001,00		89,15
		<i>Jumlah Tenaga Keamanan/Sekuriti</i>	<i>3,00</i>		<i>3,00</i>		<i>100,00</i>	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.499.650,00		1.468.700,00		97,94
		<i>Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah dengan fungsi akuntansi terkait pemeliharaan dan pengadaan barang</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>		<i>100,00</i>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.498.550,00		1.485.900,00		99,16
		<i>Jumlah dokumen laporan untuk pengadaan barang inventaris dan pemeliharaan dalam triwulan/semester/tahun</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>		<i>100,00</i>	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			37.125.000,00		31.050.000,00		83,64



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian</i>	1,00		1,00		100,00	
	Sub Kegiatan :							
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			37.125.000,00		31.050.000,00		83,64
		<i>Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan</i>	0,00		0,00		0,00	
		<i>Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Disediakan</i>	70,00		70,00		100,00	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.089.821.960,00		1.019.982.809,00		93,59
		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum</i>	1,00		1,00		100,00	
	Sub Kegiatan :							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.967.760,00		25.965.900,00		99,99
		<i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dibutuhkan</i>	17,00		17,00		100,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			320.592.600,00		271.315.000,00		84,63



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan</i>	12,00		12,00		100,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			276.116.500,00		270.961.100,00		98,13
		<i>Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Perkantoran yang Tersedia</i>	20,00		20,00		100,00	
		<i>Jumlah Tenaga Kebersihan</i>	3,00		3,00		100,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20.720.000,00		20.720.000,00		100,00
		<i>Jumlah jenis kebutuhan makan dan minum rapat pegawai yang tersedia</i>	2,00		2,00		100,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			50.401.450,00		46.583.900,00		92,43
		<i>Jumlah Barang Cetakan yang Dibutuhkan</i>	17,00		17,00		100,00	
		<i>Jumlah Penggandaan yang Dibutuhkan</i>	17,00		17,00		100,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		92.100.000,00		92.100.000,00		100,00
		<i>Jumlah Penayangan Iklan di Media Masa/Elektronik</i>	23,00		23,00		100,00	
		<i>Jumlah Surat Kabar/Koran yang Dibutuhkan</i>	7,00		7,00		100,00	
	Penyediaan Bahan/Material			70.887.300,00		70.804.450,00		99,88



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah ATK yang tersedia</i>	67,00		67,00		100,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			14.880.000,00		12.604.500,00		84,71
		<i>Jumlah Kunjungan Tamu Kedinasan dari Instansi Pemerintah dan NonPemerintah Lainnya yang Berkunjung /Konsultasi/ Koordinasi</i>	22,00		22,00		100,00	
		<i>Jumlah Tamu Kedinasan dari Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah Lainnya yang Berkunjung/Konsultasi/Koordinasi</i>	220,00		220,00		100,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			66.168.500,00		57.145.880,00		86,36
		<i>Jumlah Aparatur yang Mengikuti dan Memenuhi Undangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i>	60,00		60,00		100,00	
		<i>Jumlah Undangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i>	20,00		20,00		100,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			151.987.850,00		151.782.079,00		99,86
		<i>Jumlah Dokumen yang Telah Dikelola dan Diarsipkan</i>	296,00		296,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00		0,00		0,00
		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1,00		0,00		0,00	
	Sub Kegiatan :							
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00		0,00		0,00
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua yang Disediakan</i>	1,00		0,00		0,00	
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat yang Disediakan</i>	1,00		0,00		0,00	
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			624.282.450,00		575.904.364,00		92,25
		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	1,00		1,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Daerah						
	Sub Kegiatan :							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			290.520.000,00		249.191.438,00		85,77
		Jumlah Jenis Tagihan Rekening	3,00		3,00		100,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			333.762.450,00		326.712.926,00		97,89
		Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Terpelihara	11,00		11,00		100,00	
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara dengan Baik dan Siap Pakai	22,00		22,00		100,00	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			417.979.300,00		393.237.383,00		94,08
		Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00		1,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Sub Kegiatan :							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			131.540.000,00		124.128.588,00		94,37
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai</i>	11,00		11,00		100,00	
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai</i>	5,00		5,00		100,00	
		<i>Jumlah Kendaraan Roda Dua Dinas Jabatan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya</i>	11,00		11,00		100,00	
		<i>Jumlah Kendaraan Roda Empat Dinas Jabatan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya</i>	5,00		5,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			26.905.000,00		26.333.300,00		97,88
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai	22,00		22,00		100,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai	5,00		5,00		100,00	
		Jumlah Kendaraan Roda Dua Dinas Operasional atau Lapangan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya	22,00		22,00		100,00	
		Jumlah Kendaraan Roda Empat Dinas Operasional atau Lapangan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya	5,00		5,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			16.362.750,00		0,00		0,00
		<i>Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi</i>	<i>2,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			243.171.550,00		242.775.495,00		99,84
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik (Kondisi Aman dan Nyaman) dan Layak Ditempati</i>	<i>5,00</i>		<i>5,00</i>		<i>100,00</i>	
BIDANG ANGGARAN								
B.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah			3.107.404.460,00		2.604.095.819,00		83,80
		<i>(IKK/IKU) (1)- Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100,00	6.115.457.320,00	83,93	5.499.308.869,00	83,93	89,92



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Outcome (1) : Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD</i>	100,00	1.257.853.150,00	77,50	1.005.925.387,00	77,50	79,97
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.257.853.150,00		1.005.925.387,00		79,97
		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	1,00		1,00		100,00	
	Sub Kegiatan :							
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			260.873.950,00		218.646.000,00		83,81
		<i>Jumlah dokumen KUA dan PPAS</i>	2,00		2,00		100,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD			192.549.600,00		172.769.400,00		89,73
		<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD/PPKD</i>	74,00		74,00		100,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD			37.194.300,00		33.513.800,00		90,10
		<i>Jumlah Dokumen DPA SKPD/PPKD</i>	375,00		375,00		100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran			624.997.900,00		467.398.787,00		74,78



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	APBD							
		Jumlah Dokumen Nota Keuangan Peraturan Daerah tentang APBD	20,00		20,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Nota Keuangan RancanganPera aturan Daerah tentang APBD	20,00		20,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	50,00		50,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	50,00		50,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	50,00		50,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD	50,00		50,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	20,00		20,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	20,00		20,00		100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			131.450.200,00		106.864.200,00		81,30
		Jumlah Dokumen Regulasi dan/atau Kebijakan	150,00		150,00		100,00	
		Jumlah Peserta Pelatihan dan/atau Sosialisasi	150,00		150,00		100,00	
		Jumlah Regulasi dan/atau Kebijakan yang Diterbitkan	1,00		1,00		100,00	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			7.722.200,00		3.668.200,00		47,50
		Jumlah Dokumen potensi PAD, Bagi Hasil Provinsi dan dana Transfer	6,00		6,00		100,00	
		Jumlah Peserta Rapat Pembahasan	30,00		15,00		50,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			3.065.000,00		3.065.000,00		100,0 0
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>	<i>4,00</i>		<i>4,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Peserta Rapat Pembahasan</i>	<i>80,00</i>		<i>80,00</i>		<i>100,00</i>	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			0,00		0,00		0,00
		<i>Jumlah Dokumen Kegiatan</i>	<i>4,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
		<i>Jumlah Peserta Rapat Pembahasan</i>	<i>30,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
		<i>Outcome (2) : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola keuangan daerah</i>	<i>100,00</i>	<i>538.649.050,00</i>	<i>100,00</i>	<i>404.061.250,00</i>	<i>100,00</i>	<i>75,03</i>
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			538.649.050,00		404.061.250,00		75,03
		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		<i>100,00</i>	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Sub Kegiatan :							
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			538.649.050,00		404.061.250,00		75,03
		<i>Jumlah Dokumen Standar Biaya Belanja Daerah</i>	<i>106,00</i>		<i>106,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Tim Penyusun Standar Biaya Belanja Daerah</i>	<i>45,00</i>		<i>45,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Peserta Sosialisasi Pedum APBD</i>	<i>150,00</i>		<i>150,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Regulasi dan/atau Kebijakan tentang Pedoman Penyusunan APBD</i>	<i>150,00</i>		<i>150,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Tim Anggaran Pemerintah Daerah</i>	<i>45,00</i>		<i>45,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Peserta Sosialisasi ASB</i>	<i>106,00</i>		<i>106,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>(IKK/IKU) (2)- Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Outcome (3) : Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan</i>	<i>100,00</i>	1.310.984.260,00	<i>100,00</i>	1.194.109.182,00	<i>100,00</i>	91,08



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		APBD						
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.310.984.260,00		1.194.109.182,00		91,08
		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,00		1,00		100,00	
	Sub Kegiatan :							
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			237.268.700,00		207.412.020,00		87,42
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2,00		2,00		100,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD			231.336.080,00		216.028.710,00		93,38
		Jumlah Dokumen RKPA SKPD/PPKD	74,00		74,00		100,00	
		Jumlah Dokumen RKPA SKPD/PPKD Mendahului RKPA Perubahan Reguler	104,00		104,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD			178.300.100,00		128.376.682,00		72,00
		<i>Jumlah Dokumen DPPA SKPD/PPKD</i>	<i>375,00</i>		<i>375,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Dokumen DPPA SKPD/PPKD Mendahului DPP A Perubahan Reguler</i>	<i>104,00</i>		<i>104,00</i>		<i>100,00</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			664.079.380,00		642.291.770,00		96,72
		<i>Jumlah Dokumen Nota Keuangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD</i>	<i>20,00</i>		<i>20,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD</i>	<i>20,00</i>		<i>20,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD</i>	<i>50,00</i>		<i>50,00</i>		<i>100,00</i>	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	50,00		50,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD	50,00		50,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	20,00		20,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	50,00		50,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD	20,00		20,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	20,00		20,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

BIDANG PERBENDAHARAAN								
		<i>(IKK/IKU) (3)- Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata- rata penyelesaian SP2D</i>	100,00		100,00		100,00	
		<i>Outcome (4) : Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran</i>	100,00	1.090.852.500,00	100,00	1.047.378.438,00	100,00	97,02
2.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1.090.852.500,00		1.047.378.438,00		97,02
		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	1,00		1,00		100,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			143.801.370,00		142.765.370,00		99,56
		<i>Terkoordinasi a Pengelolaan Kas Daerah</i>	4,00		4,00		100,00	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			191.546.540		186.488.800,00		97,36
		<i>Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD</i>	444,00		444,00		100,00	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah			69.962.700,00		69.957.700,00		99,99



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang disajikan secara tepat waktu</i>	2,00		2,00		100,00	
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			52.187.490,00		50.405.545,00		96,59
		<i>Jumlah dokumen Pelaporan DAU, DAK, BOK, DID, DBH, Bantuan Provinsi</i>	6,00		6,00		100,00	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			207.002.120,00		205.279.324,00		99,17
		<i>Jumlah Cetak SP2D yang diselesaikan</i>	4,00		4,00		100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			78.289.200,00		53.576.851,00		68,43



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Terkoordinasiny a Penyusunan Laporan Pemungutan dan Penyetoran Perhitungan PFK</i>	<i>3,00</i>		<i>3,00</i>		<i>100,00</i>	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas			114.718.180,00		113.921.080,00		99,31
		<i>Jumlah Laporan Piutang dan Utang Daerah</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>		<i>100,00</i>	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait			233.744.900,00		224.983.768,00		96,25
		<i>Jumlah Dokumen rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan SKPD</i>	<i>876,00</i>		<i>876,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Outcome (5) : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola keuangan daerah</i>	<i>100,00</i>	483.416.900,00	<i>100,00</i>	479.931.140,00	<i>100,00</i>	99,28
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			483.416.900,00		479.931.140,00		99,28



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	1,00		1,00		100,00	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			483.416.900,00		479.931.140,00		99,28
		<i>Jumlah peserta pelatihan pengelolaan keuangan pada SKPD</i>	222,00		222,00		100,00	
		<i>Jumlah Update Data Gaji PNS Daerah</i>	14,00		14,00		100,00	
		<i>(IKK/IKU) (4)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya</i>	100,00		100,00		100,00	
		<i>Outcome (6) : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap</i>	100,00	1.433.783.460,00	90,91	1.367.903.472,00	90,91	95,41



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>(IKK/IKU) (5)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP</i>	100,00		100,00		100,00	
		<i>Outcome (6) : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP</i>	100,00	1.433.783.460,00	100,00	1.367.903.472,00	100,00	95,41
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.433.783.460,00		1.367.903.472,00		95,41
		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	1,00		1,00		100,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			41.557.980,00		41.308.038,00		99,40
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Kas Pemerintah daerah yang diselesaikan</i>	3,00		3,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban			253.532.690,00		240.345.984,00		94,80
		<i>Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan</i>	<i>20,00</i>		<i>20,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi</i>	<i>876,00</i>		<i>876,00</i>		<i>100,00</i>	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			106.311.450,00		102.858.800,00		96,75
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Daerah yang Diselesaikan</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>		<i>100,00</i>	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			357.999.740,00		344.219.450,00		96,15
		<i>Jumlah Dokumen LKPD Unaudited dan Audited yang Diselesaikan</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>		<i>100,00</i>	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			109.797.300,00		96.183.400,00		87,60
		<i>Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>		<i>100,00</i>	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			27.459.500,00		27.443.500,00		99,94
		<i>Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		<i>100,00</i>	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			156.807.000,00		141.033.700,00		89,94



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara n Akuntansi Pemerintah Daerah</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>		<i>100,00</i>	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			380.317.800,00		374.510.600,00		98,47
		<i>Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Jenis Software Pengembangan Aplikasi SIPKD yang Terintegrasi dan Handal</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Outcome (7) : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan daerah</i>	<i>100,00</i>	0,00	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>	0,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			0,00		0,00		0,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	1,00		0,00		0,00	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		0,00
		<i>Jumlah Peraturan yang disosialisasikan</i>	4,00		0,00		0,00	
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								
		<i>(IKK/IKU) (6)-Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya</i>	100,00		100,00		100,00	
		<i>(IKK/IKU) (7)-Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya</i>	100,00		100,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		100,00	2.623.229.825,00	65,92	2.267.804.206,00	65,92	86,45
		<i>Outcome (1) : Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar</i>	100,00	1.063.899.496,00	100,00	1.755.782.339,00	100,00	94,97
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.063.899.496,00		1.755.782.339,00		94,97
		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	1,00		1,00		100,00	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			124.249.800,00		122.286.200,00		98,42
		<i>Jumlah Dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	73,00		73,00		100,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			85.641.400,00		74.829.984,00		87,38



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan Pengelola Barang yang Diselesaikan</i>	<i>74,00</i>		<i>74,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah SKPD dan Pengelola Barang yang Diselesaikan</i>	<i>74,00</i>		<i>74,00</i>		<i>100,00</i>	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			79.112.700,00		73.214.700,00		92,54
		<i>Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati tentang Barang Milik Daerah</i>	<i>85,00</i>		<i>85,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Peraturan Bupati/Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah</i>	<i>85,00</i>		<i>85,00</i>		<i>100,00</i>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah			443.832.900,00		432.642.776,00		97,48
		<i>Jumlah SKPD yang Melakukan Penatausahaan BMD Sesuai dengan Aturan</i>	<i>74,00</i>		<i>74,00</i>		<i>100,00</i>	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah yang Dikembangkan</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		<i>100,00</i>	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah			102.149.550,00		92.399.913,00		90,46
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris SKPD dan Pengelola Barang</i>	<i>74,00</i>		<i>74,00</i>		<i>100,00</i>	
	Penilaian Barang Milik Daerah			635.491.370,00		606.169.868,00		95,39
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Proses Nilai Taksir/Appraisal Barang Milik Daerah yang Akan Dihapuskan, Dipindahtangkan dan atau Disewakan</i>	<i>5,00</i>		<i>5,00</i>		<i>100,00</i>	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			191.033.320,00		184.367.714,00		96,51



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Dokumen Administrasi Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah SKPD yang Diselesaikan</i>	73,00		73,00		100,00	
		<i>Jumlah dokumen penetapan status penggunaan BMD dan persetujuan pengalihan status penggunaan BMD</i>	2,00		2,00		100,00	
		<i>Jumlah dokumen pemindahtanganan BMD</i>	1,00		1,00		100,00	
		<i>Jumlah dokumen pemusnahan BMD</i>	1,00		1,00		100,00	
		<i>Jumlah dokumen penghapusan BMD</i>	1,00		1,00		100,00	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			131.271.925,00		120.860.984,00		92,07
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Tahunan dan Semesteran yang Diselesaikan</i>	2,00		2,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			55.996.200,00		49.010.200,00		87,52
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Neraca Aset/Barang Daerah yang Diyakini Kewajarannya</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Outcome (2) : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola barang daerah</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Pengelolaan Barang Milik Daerah			0,00		0,00		0,00
		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>1,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		0,00
		<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>164,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
		<i>Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD</i>	<i>200,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

C.	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan			774.450.660,00		512.021.867,00		66,11
		(IKK/IKU) (8)- Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi	69,78		53,25		76,31	
		Outcome (3) : Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik/benar	100,00	774.450.660,00	97,76	512.021.867,00	97,76	66,11
	Pengelolaan Barang Milik Daerah			774.450.660,00		512.021.867,00		66,11
		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,00		1,00		100,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah			687.633.075,00		429.103.683,00		62,40
		Jumlah Penyelesaian/Penuntutan Penggantian kepada Pihak yang Menyebabkan Kerugian Daerah	83,00		83,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Diasuransikan	58,00		58,00		100,00	
		Jumlah Gedung Bangunan Milik Daerah yang Diasuransikan	50,00		50,00		100,00	
		Jumlah Bidang Tanah Milik Daerah yang Telah dan atau Sedang Proses Sertifikasi	125,00		97,00		77,60	
		Jumlah Kendaraan Roda Empat Milik Daerah yang Dibranding	20,00		20,00		100,00	
		Jumlah Patok Batas yang Terpasang	20,00		20,00		100,00	
		Jumlah Plang Kepemilikan Tanah Milik Daerah	10,00		10,00		100,00	
		Jumlah Bidang Tanah Milik Daerah yang Lunas Bayar SPPT PBB	60,00		60,00		100,00	
		Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Milik Daerah yang Telah Melakukan Daftar Ulang	60,00		60,00		60,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Dokumen Administrasi Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah SKPD yang Diselesaikan</i>	<i>73,00</i>		<i>73,00</i>		<i>100,00</i>	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			86.817.585,00		82.918.184,00		95,51
		<i>Jumlah Bidang Tanah yang Diusahakan/Diselesaikan</i>	<i>13,00</i>		<i>13,00</i>		<i>100,00</i>	

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020;

Tabel. 4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan
Pencapaian Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2021 dengan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	Realisasi Indikator Kinerja	
	2021	2020
Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah		
(IKK/IKU) -Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya (Non Kumulatif)	100 Prosen	100 Prosen
(IKK/IKU) -Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD (Non Kumulatif)	100 Prosen	100 Prosen
(IKK/IKU) -Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD (Non Kumulatif)	100 Prosen	100 Prosen
IKK/IKU) -Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D (Non Kumulatif)	100 Prosen	100 Prosen
(IKK/IKU) -Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP (Non Kumulatif)	100 Prosen	0 Prosen



Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan		
(IKK/IKU) -Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi (Non Kumulatif)	53,25 Prosen	52,63 Prosen
(IKK/IKU) -Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya (Non Kumulatif)	100 Prosen	0 Prosen
Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah		
(IKK/IKU) -Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah (Non Kumulatif)	80 Poin	80 Poin

Tabel. 5
Sasaran dan Program
Pencapaian Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2021 dengan Tahun 2020

No.	BIDANG/PROGR AM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2021				2020			
			REALISASI		CAPAIAN (%)		REALISASI		CAPAIAN (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	SEKRETARIAT									
A.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah			9.274.992.148		92,79		8.415.156.772	91,56	
		(IKK/IKU)- Peningkata n kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaa n keuangan dan aset daerah	80,00		100,00		80,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		93,64	9.274.992.148	93,64	92,79	89,80	8.415.156.772	89,80	91,56
		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,00	146.746.150	100,00	98,63	99,36	14.904.000	99,36	99,36
		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	81,82	225.964.251	81,82	89,95	99,87	43.463.900	99,87	99,87
		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset	100,00	6.882.107.191	100,00	92,67	84,67	271.622.500	84,67	84,67



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		daerah								
		Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,00	31.050.000,00	100,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,00	1.019.982.809	100,00	93,59	72,13	1.704.286.913	72,13	72,13
		Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	80,00	969.141.747	80,00	92,98	92,97	791.901.214	92,97	92,97
BIDANG ANGGARAN										
B.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah			2.604.095.819		83,80		8.415.156.772		91,56



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		(IKK/IKU) (1)- Ketepatan waktu penyusu nan Rancangan APBD	100,00		100,00		100,00		100,00	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		83,93	5.499.308.869	83,93	89,92	92,18	7.108.873.500	92,18	92,18
		Outcome (1) : Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD	77,50	1.005.925.387	77,50	79,97	100,00		100,00	
		Outcome (2): Peningkatan pengetahua n dan kemampuan pada pengelola keuangan daerah	100,00	404.061.250	100,00	75,03	0,00		0,00	
		(IKK/IKU) (2)- Ketepatan waktu penyusu nan Rancanga n Perubahan APBD	100,00		100,00		100,00		100,00	
		Outcome (3) : Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	100,00	1.194.109.182	100,00	91,08	100,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

BIDANG PERBENDAHARAAN										
		(IKK/IKU) (3)- Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata- rata penyelesaian SP2D	100,00		100,00		100,00		100,00	
		Outcome (4) : Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran	100,00	1.047.378.438	100,00	97,02	100,00		100,00	
		Outcome (5) : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola keuangan daerah	100,00	479.931.140	100,00	99,28	0,00		0,00	
II	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	350.138.050	80,00	80,00
		Outcome (5) : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah	0,00		0,00		80,00		80,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		(IKK/IKU) (4)- Peningka tan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajaran nya	100,00		100,00		100,00		100,00	
		Outcome (6) : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap	100,00	1.367.903.472	100,00	95,41	100,00		100,00	
		(IKK/IKU) (5)- Peningkata n kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP	100,00		100,00		0,00		0,00	
		Outcome (6) : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP	100,00	1.367.903.472	100,00	95,41	0,00		0,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Outcome (7) : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										
IV	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		65,92	2.267.804.206	65,92	86,45	87,78	1.189.605.130	87,78	87,78
		(IKK/IKU) (4)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya	100,00		100,00		100,00		100,00	
		(IKK/IKU) (7)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya	100,00		100,00		0,00		0,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Outcome (1) : Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar	100,00	1.755.782.339	100,00	94,97	100,00		100,00	
		Outcome (2) : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola barang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
C.	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan			512.021.867		66,11		233.459.908		74,39
		(IKK/IKU) (5)- Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi	53,25		76,31		51,99		87,07	
		Outcome (3) : Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan dimanfaatkan	97,76	512.021.867	97,76	66,11	97,85		97,85	97,85



		an dengan baik/benar							
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra);

Secara umum Badan Keuangan dan Aset Daerah telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 – 2024. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 8 (Delapan) indikator kinerja yang ditetapkan. Berikut disajikan capaian indikator sasaran dan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran 5 (lima) tahun sesuai Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 – 2024 :

Tabel. 6
Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir
Periode RPJMD (RENSTRA BKAD 2019 – 2024)

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RPJMD (RENSTRA BKAD 2019 – 2024)	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2020 DIBANDING TARGET 5 TAHUN
Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah			
(IKK/IKU) -Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya (Non Kumulatif	100 Prosen	100 Prosen	100 Prosen
(IKK/IKU) -Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD (Non Kumulatif)	100 Prosen	100 Prosen	100 Prosen
(IKK/IKU) -Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD (Non Kumulatif)	100 Prosen	100 Prosen	100 Prosen



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

(IKK/IKU) -Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D (Non Kumulatif)	100 Prosen	100 Prosen	100 Prosen
(IKK/IKU) -Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP (Non Kumulatif)	100 Prosen	100 Prosen	100 Prosen
Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan			
(IKK/IKU) -Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi (Non Kumulatif)	100 Prosen	53,25 Prosen	53,25 Prosen
(IKK/IKU) -Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya (Non Kumulatif)	100 Prosen	100 Prosen	100 Prosen
Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah			
(IKK/IKU) -Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah (Non Kumulatif)	82 Poin	80 Poin	98 Prosen

Tabel. 8
Perbandingan Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sampai Dengan Akhir Periode RPJMD
(RENSTRA BKAD 2019 – 2024)

No.	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI 2021		TARGET RENSTRA 2021	
			K	Rp	K	Rp
	SEKRETARIAT					
A.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah			9.274.992.148		16.099.775.000,00
		<i>(IKK/IKU)- Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah</i>	80,00		80,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		93,64	9.274.992.148	100,00	16.099.775.000,00
		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,00	146.746.150	100,00	192.500.000,00
		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	81,82	225.964.251	100,00	372.000.000,00
		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,00	6.882.107.191	100,00	8.356.000.000,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,00	31.050.000	100,00	73.000.000,00
		Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,00	1.019.982.809	100,00	1.738.400.000,00
		Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	80,00	969.141.747	100,00	5.367.875.000,00
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			146.746.150		192.500.000,00
		Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1,00		1,00	
	Sub Kegiatan :					



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.712.150		15.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Renstra, Review Renstra, Renja dan Perubahan RenjaSKPD yang Diselesaikan</i>	<i>4,00</i>		<i>4,00</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD			5.273.700		10.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Pra RKA, RKA Hantaran, RKAPersetujua n dan RKA Penetapan SKPD yang diselesaikan</i>	<i>4,00</i>		<i>3,00</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			5.273.700		10.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen RKAP Hantaran, RKAP Persetujuan,RK AP Penetapan dan RKAP Parsial SKPD yang diselesaikan</i>	<i>4,00</i>		<i>4,00</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD			3.555.900		10.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD yang diselesaikan</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD			3.886.700		10.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen DPAP Parsial dan DPAP Reguler SKPD yang diselesaikan</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.958.400		10.000.000,00
		<i>Jumlah laporan capaian kinerja kegiatan, program, sasaran bulanan dan triwulanan SKPD yang diselesaikan</i>	<i>4,00</i>		<i>4,00</i>	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			111.117.350		127.500.000,00
		<i>Jumlah Dokumen LKPJ/LPPD, LKIP, IKU Perkin, RKT, PMPRB, SPIP, SP/IKM dan Renaksi KPK SKPD yang diselesaikan</i>	<i>8,00</i>		<i>8,00</i>	
		<i>Jumlah Sertifikat ISO yang Diperoleh Terhadap SOP atau Jenis Pelayanan yang Dijaminkan</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>	
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.898.534.991 111		8.378.000.000,00
		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>	
	Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.882.107.191		8.356.000.000,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangan ya setiap bulan</i>	50,00		50,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.927.700		4.000.000,00
		<i>Jumlah dokumen pengajuan SPP dan penerbitan SPMUP, LS, GU/TU serta gaji yang dicek kelengkapannya</i>	4,00		4,00	
		<i>Jumlah dokumen SPJ BP/BPP SKPD yang telah diverifikasi dan disahkan</i>	6,00		6,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			2.255.600		2.400.000,00
		<i>Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD (Neraca, LO, LPE dan BAR Validasi Akun)</i>	4,00		4,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			9.803.800		10.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Diselesaikan</i>	1,00		1,00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00		1.500.000,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari auditor internal dan eksternal yang telah diterima oleh SKPD</i>	0,00		2,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			2.440.700		2.500.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang Diselesaikan</i>	1,00		1,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		1.600.000,00
	<i>Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang Diselesaikan</i>	<i>Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang Diselesaikan</i>	0,00		1,00	
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			209.536.451		350.000.000,00
		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah</i>	1,00		1,00	
	Sub Kegiatan :					
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1.081.850		2.500.000,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang telah diselesaikan</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			205.500.001		340.000.000,00
		<i>Jumlah Tenaga Keamanan/Sekuriti</i>	<i>3,00</i>		<i>6,00</i>	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.468.700,00		2.500.000,00
		<i>Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah dengan fungsi akuntansi terkait pemeliharaan dan pengadaan barang</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.485.900,00		5.000.000,00
		<i>Jumlah dokumen laporan untuk pengadaan barang inventaris dan pemeliharaan dalam triwulan/semester/tahun</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			31.050.000		73.000.000,00
		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Sub Kegiatan :					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			31.050.000		73.000.000,00
		<i>Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan</i>	<i>0,00</i>		<i>75,00</i>	
		<i>Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Disediakan</i>	<i>70,00</i>		<i>75,00</i>	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.019.982.809		1.738.400.000,00
		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>	
	Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.965.900		27.500.000,00
		<i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dibutuhkan</i>	<i>17,00</i>		<i>17,00</i>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			271.315.000		475.000.000,00
		<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan</i>	<i>12,00</i>		<i>16,00</i>	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			270.961.100		443.500.000,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Perkantoran yang Tersedia</i>	<i>20,00</i>		<i>20,00</i>	
		<i>Jumlah Tenaga Kebersihan</i>	<i>3,00</i>		<i>6,00</i>	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20.720.000		25.000.000,00
		<i>Jumlah jenis kebutuhan makan dan minum rapat pegawai yang tersedia</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			46.583.900		55.000.000,00
		<i>Jumlah Barang Cetak yang Dibutuhkan</i>	<i>17,00</i>		<i>17,00</i>	
		<i>Jumlah Penggandaan yang Dibutuhkan</i>	<i>17,00</i>		<i>17,00</i>	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perauran Perundang-undangan		92.100.000		121.000.000,00
		<i>Jumlah Penayangan Iklan di Media Masa/Elektronik</i>	<i>23,00</i>		<i>23,00</i>	
		<i>Jumlah Surat Kabar/Koran yang Dibutuhkan</i>	<i>7,00</i>		<i>7,00</i>	
	Penyediaan Bahan/Material			70.804.450		71.500.000,00
		<i>Jumlah ATK yang tersedia</i>	<i>67,00</i>		<i>67,00</i>	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			12.604.500		34.900.000,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah Kunjungan Tamu Kedinasan dari Instansi Pemerintah dan NonPemerintah Lainnya yang Berkunjung/Konsultasi/Koordinasi	22,00		22,00	
		Jumlah Tamu Kedinasan dari Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah Lainnya yang Berkunjung/Konsultasi/Koordinasi	220,00		220,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			57.145.880		235.000.000,00
		Jumlah Aparatur yang Mengikuti dan Memenuhi Undangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	60,00		144,00	
		Jumlah Undangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	20,00		48,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			151.782.079		250.000.000,00
		Jumlah Dokumen yang Telah Dikelola dan Diarsipkan	296,00		296,00	
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00		500.000.000,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,72		1,00	
	Sub Kegiatan :					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00		500.000.000,00
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua yang Disediakan	0,00		1,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat yang Disediakan	0,00		1,00	
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			307.538.573,00		935.000.000,00
		Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00		1,00	
	Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			249.191.438,00		495.000.000,00
		Jumlah Jenis Tagihan Rekening	3,00		3,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			326.712.926		440.000.000,00
		<i>Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Terpelihara</i>	<i>11,00</i>		<i>11,00</i>	
		<i>Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara dengan Baik dan Siap Pakai</i>	<i>22,00</i>		<i>22,00</i>	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			393.237.383		3.932.875.000,00
		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>	
	Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			124.128.588		139.290.000,00
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai</i>	<i>11,00</i>		<i>11,00</i>	
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman)</i>	<i>5,00</i>		<i>5,00</i>	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		dan Siap Pakai				
		Jumlah Kendaraan Roda Dua Dinas Jabatan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya	11,00		11,00	
		Jumlah Kendaraan Roda Empat Dinas Jabatan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya	5,00		5,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			26.333.300		43.585.000,00
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasio nal Roda Dua dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai	22,00		22,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasio nal Roda Empat dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai	5,00		5,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah Kendaraan Roda Dua Dinas Operasional atau Lapangan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya	22,00		22,00	
		Jumlah Kendaraan Roda Empat Dinas Operasional atau Lapangan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya	5,00		5,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00		3.250.000.000,00
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	0,00		2,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			242.775.495		500.000.000,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik (Kondisi Aman dan Nyaman) dan Layak Ditempati	5,00		5,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

BIDANG ANGGARAN						
B.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah			2.604.095.819		11.414.000.000,00
		<i>(IKK/IKU) (1)- Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD</i>	100,00		100,00	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		83,93	5.499.308.869	100,00	11.414.000.000,00
		<i>Outcome (1) : Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD</i>	77,50	1.005.925.387	100,00	3.053.500.000,00
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.005.925.387		3.053.500.000,00
		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	1,00		1,00	
	Sub Kegiatan :					
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			218.646.000		500.000.000,00
		<i>Jumlah dokumen KUA dan PPAS</i>	2,00		2,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD			172.769.400		450.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD/PPKD</i>	74,00		74,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD			33.513.800		450.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen DPA SKPD/PPKD</i>	<i>375,00</i>		<i>375,00</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			467.398.787		625.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Nota Keuangan Peraturan Daerah tentang APBD</i>	<i>20,00</i>		<i>20,00</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD</i>	<i>20,00</i>		<i>20,00</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD</i>	<i>50,00</i>		<i>50,00</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD</i>	<i>50,00</i>		<i>50,00</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD</i>	<i>50,00</i>		<i>50,00</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD</i>	<i>50,00</i>		<i>50,00</i>	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	20,00		20,00	
		Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	20,00		20,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			106.864.200		210.500.000,00
		Jumlah Dokumen Regulasi dan/atau Kebijakan	150,00		150,00	
		Jumlah Peserta Pelatihan dan/atau Sosialisasi	150,00		150,00	
		Jumlah Regulasi dan/atau Kebijakan yang Diterbitkan	1,00		1,00	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			3.668.200		61.000.000,00
		Jumlah Dokumen potensi PAD, Bagi Hasil Provinsi dan dana Transfer	6,00		6,00	
		Jumlah Peserta Rapat Pembahasan	15,00		30,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			3.065.000		55.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>	<i>4,00</i>		<i>4,00</i>	
		<i>Jumlah Peserta Rapat Pembahasan</i>	<i>80,00</i>		<i>80,00</i>	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			0,00		70.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Kegiatan</i>	<i>0,00</i>		<i>4,00</i>	
		<i>Jumlah Peserta Rapat Pembahasan</i>	<i>0,00</i>		<i>30,00</i>	
		<i>Outcome (2) : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan daerah</i>	<i>100,00</i>	404.061.250	<i>100,00</i>	632.000.000,00
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			404.061.250		632.000.000,00
		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>	
	Sub Kegiatan :					



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			404.061.250		632.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Standar Biaya Belanja Daerah</i>	<i>106,00</i>		<i>106,00</i>	
		<i>Jumlah Tim Penyusun Standar Biaya Belanja Daerah</i>	<i>45,00</i>		<i>45,00</i>	
		<i>Jumlah Peserta Sosialisasi Pedum APBD</i>	<i>150,00</i>		<i>150,00</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Regulasi dan/atau Kebijakan tentang Pedoman Penyusunan APBD</i>	<i>150,00</i>		<i>150,00</i>	
		<i>Jumlah Tim Anggaran Pemerintah Daerah</i>	<i>45,00</i>		<i>45,00</i>	
		<i>Jumlah Peserta Sosialisasi ASB</i>	<i>106,00</i>		<i>106,00</i>	
		<i>(IKK/IKU) (2)- Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Outcome (3) : Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD</i>	<i>100,00</i>	1.194.109.182	<i>100,00</i>	2.987.500.000,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.194.109.182		2.987.500.000,00
		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	1,00		1,00	
	Sub Kegiatan :					
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			207.412.020		357.500.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS</i>	2,00		2,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD			216.028.710		900.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen RKPA SKPD/PPKD</i>	74,00		74,00	
		<i>Jumlah Dokumen RKPA SKPD/PPKD Mendahului RKPA Perubahan Reguler</i>	104,00		104,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD			128.376.682		900.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen DPPA SKPD/PPKD</i>	375,00		375,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah Dokumen DPPA SKPD/PPKD Mendahului DP PA Perubahan Reguler	104,00		104,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			642.291.770		830.000.000,00
		Jumlah Dokumen Nota Keuangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	20,00		20,00	
		Jumlah Dokumen Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	20,00		20,00	
		Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD	50,00		50,00	
		Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	50,00		50,00	
		Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD	50,00		50,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	20,00		20,00	
		Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	50,00		50,00	
		Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD	20,00		20,00	
		Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	20,00		20,00	
BIDANG PERBENDAHARAAN						
		(IKK/IKU) (3)- Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D	100,00		100,00	
		Outcome (4) : Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D	100,00	1.047.378.438	100,00	1.915.000.000,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

2.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1.090.852.500		1.915.000.000,00
		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,00		1,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			143.801.370		555.000.000,00
		Terkoordinasinya Pengelolaan Kas Daerah	4,00		4,00	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			191.546.540		234.000.000,00
		Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD	444,00		444,00	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah			69.962.700		73.000.000,00
		Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang disajikan secara tepat waktu	2,00		2,00	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			52.187.490		164.000.000,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah dokumen Pelaporan DAU, DAK, BOK, DID, DBH, Bantuan Provinsi</i>	6,00		6,00	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			205.279.324		273.000.000,00
		<i>Jumlah Cetak SP2D yang diselesaikan</i>	4,00		4,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			53.576.851		134.000.000,00
		<i>Terkoordinasin ya Penyusunan Laporan Pemungutan dan Penyetoran Perhitungan PFK</i>	3,00		3,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas			113.921.080		121.000.000,00
		<i>Jumlah Laporan Piutang dan</i>	2,00		2,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Utang Daerah</i>				
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait			224.983.768		361.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan SKPD</i>	<i>876,00</i>		<i>876,00</i>	
		<i>Outcome (5) :Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan daerah</i>	<i>100,00</i>	479.931.140	<i>100,00</i>	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			479.931.140		612.000.000,00
		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			479.931.140,00		612.000.000
		<i>Jumlah peserta pelatihan pengelolaan keuangan pada SKPD</i>	<i>222,00</i>		<i>222,00</i>	
		<i>Jumlah Update Data Gaji PNS Daerah</i>	<i>14,00</i>		<i>14,00</i>	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		(IKK/IKU) (4)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya	100,00		100,00	
		Outcome (6) : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap	90,91	1.367.903.472	100,00	0,00
		(IKK/IKU) (4)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya	100,00		100,00	
		Outcome (6) : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap	100,00	1.367.903.472	100,00	2.101.000.000,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.367.903.472		2.101.000.000,00
		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,00		1,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			41.308.038		121.000.000,00
		Jumlah Dokumen Laporan Kas Pemerintah daerah yang diselesaikan	3,00		3,00	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban			240.345.984		490.000.000,00
		Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	20,00		20,00	
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi	876,00		876,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			102.858.800		121.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Daerah yang Diselesaikan</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			344.219.450		363.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen LKPD Unaudited dan Audited yang Diselesaikan</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			96.183.400		232.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2,00		2,00	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			27.443.500		75.000.000,00
		Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1,00		1,00	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			141.033.700		205.000.000,00
		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2,00		2,00	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			374.510.600		494.000.000,00
		Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2,00	2,00	2,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah Jenis Software Pengembangan Aplikasi SIPKD yang Terintegrasi dan Handal	1,00		1,00	
		Outcome (7) :Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan daerah	0,00	0,00	100,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			0,00		113.000.000,00
		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	0,00		1,00	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			0,00		113.000.000,00
		Jumlah Peraturan yang disosialisasikan	0,00		4,00	
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		(IKK/IKU) (4)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya	100,00		100,00	
		(IKK/IKU) (7)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya	100,00		100,00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		65,92	2.267.804.206	100,00	5.028.999.678,00
		Outcome (1) : Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi , Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar	100,00	1.755.782.339	100,00	3.418.774.600,00
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.755.782.339		3.418.774.600,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	1,00		1,00	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			122.286.200		260.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	73,00		73,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			74.829.984		136.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan Pengelola Barang yang Diselesaikan</i>	74,00		74,00	
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pemeliharaan/ Perawatan Barang Milik Daerah SKPD dan Pengelola Barang yang Diselesaikan</i>	74,00		74,00	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			73.214.700		440.000.000,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati tentang Barang Milik Daerah	85,00		85,00	
		Jumlah Dokumen Peraturan Bupati/Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah	85,00		85,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah			432.642.776		613.774.600,00
		Jumlah SKPD yang Melakukan Penatausahaan BMD Sesuai dengan Aturan	74,00		74,00	
		Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah yang Dikembangkan	1,00		1,00	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah			92.399.913		600.000.000,00
		Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris SKPD dan Pengelola Barang	74,00		74,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Penilaian Barang Milik Daerah			635.491.370		1.000.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Proses Nilai Taksir/Appraisal Barang Milik Daerah yang Akan Dihapuskan, Dipindahtanganan dan atau Disewakan</i>	<i>5,00</i>		<i>5,00</i>	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			184.367.714		519.000.000,00
		<i>Jumlah Dokumen Administrasi Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah SKPD yang Diselesaikan</i>	<i>73,00</i>		<i>73,00</i>	
		<i>Jumlah dokumen penetapan status penggunaan BMD dan persetujuan pengalihan status penggunaan BMD</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>	
		<i>Jumlah dokumen pemindahtanganan BMD</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah dokumen pemusnahan BMD	1,00		1,00	
		Jumlah dokumen penghapusan BMD	1,00		1,00	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			120.860.984		234.000.000,00
		Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Tahunan dan Semesteran yang Diselesaikan	2,00		2,00	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			49.010.200		56.000.000,00
		Jumlah Dokumen Laporan Neraca Aset/Barang Daerah yang Diyakini Kewajarannya	1,00		1,00	
		Outcome (2) : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola barang daerah	0,00	0,00	100,00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah			0,00		268.225.400,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	0,00		1,00	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			0,00		268.225.400,00
		<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	0,00		164,00	
		<i>Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD</i>	0,00		200,00	
C.	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan			512.021.867		1.341.999.678,00
		<i>(IKK/IKU) (5)- Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi</i>	53,25		69,78	
		<i>Outcome (3) : Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik/benar</i>	97,76	512.021.867	100,00	1.341.999.678,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Pengelolaan Barang Milik Daerah			512.021.867		1.341.999.678,00
		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,00		1,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah			429.103.683		1.034.000.000,00
		Jumlah Penyelesaian/Penuntutan Penggantian kepada Pihak yang Menyebabkan Kerugian Daerah	83,00		83,00	
		Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Diasuransikan	58,00		58,00	
		Jumlah Gedung Bangunan Milik Daerah yang Diasuransikan	50,00		50,00	
		Jumlah Bidang Tanah Milik Daerah yang Telah dan atau Sedang Proses Sertifikasi	97,00		125,00	
		Jumlah Kendaraan Roda Empat Milik Daerah yang Dibranding	20,00		20,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah Patok Batas yang Terpasang	20,00		20,00	
		Jumlah Plang Kepemilikan Tanah Milik Daerah	10,00		10,00	
		Jumlah Bidang Tanah Milik Daerah yang Lunas Bayar SPPT PBB	60,00		60,00	
		Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Milik Daerah yang Telah Melakukan Daftar Ulang	60,00		60,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah SKPD yang Diselesaikan	73,00		73,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			82.918.184		307.999.678,00
		Jumlah Bidang Tanah yang Diusahakan/Diselesaikan	13,00		13,00	



4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional **(jika ada)**;

Realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon belum ada.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja*. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat diuraikan pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel. 5

- Misi : Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah
- Tujuan : Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		%
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah				
	(IKK/IKU) -Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset	100 Prosen	100 Prosen	100 Prosen



	tetap yang diyakini kewajarannya (Non Kumulatif)			
	(IKK/IKU) -Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD (Non Kumulatif)	100 Prosen	100 Prosen	100 Prosen
	(IKK/IKU) -Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD (Non Kumulatif)	100 Prosen	100 Prosen	100 Prosen
	IKK/IKU) -Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D (Non Kumulatif)	100 Prosen	100 Prosen	100 Prosen
	(IKK/IKU) -Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP (Non Kumulatif)	100 Prosen	100 Prosen	100 Prosen
Rata - Rata				100 %

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran **meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah** dengan 5 (lima) indikator kinerja utama menunjukkan pada Tahun 2021 nilai capaian indikator kinerja utama dengan nilai capaian sebesar 100% dan nilai rata – rata dari 5 (lima) indikator kinerja utama tersebut predikat **sangat berhasil**, dengan uraian pencapaian indikator kinerja 5 (lima) tahun sesuai Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024. Sebagai upaya mencapai misi, tujuan dan sasaran ini maka Badan Keuangan dan Aset Daerah menuangkan 1 (satu) program, 4 (empat) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, sebagaimana tabel berikut :



Tabel. 5.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pencapaian Sasaran ***Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah***

No.	BIDANG/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	BIDANG ANGGARAN							
B.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah			3.107.404.460,00		2.604.095.819,00		83,80
		(IKK/IKU) (1)- Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD	100,00		100,00		100,00	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100,00	6.115.457.320,00	83,93	5.499.308.869,00	83,93	89,92
		Outcome (1) : Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD	100,00	1.257.853.150,00	77,50	1.005.925.387,00	77,50	79,97
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.257.853.150,00		1.005.925.387,00		79,97



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	1,00		1,00		100,00	
	Sub Kegiatan :							
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			260.873.950,00		218.646.000,00		83,81
		<i>Jumlah dokumen KUA dan PPAS</i>	2,00		2,00		100,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD			192.549.600,00		172.769.400,00		89,73
		<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD/PPKD</i>	74,00		74,00		100,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD			37.194.300,00		33.513.800,00		90,10
		<i>Jumlah Dokumen DPA SKPD/PPKD</i>	375,00		375,00		100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			624.997.900,00		467.398.787,00		74,78



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah Dokumen Nota Keuangan Peraturan Daerah tentang APBD	20,00		20,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	20,00		20,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	50,00		50,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	50,00		50,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	50,00		50,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD	50,00		50,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD</i>	20,00		20,00		100,00	
		<i>Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD</i>	20,00		20,00		100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			131.450.200,00		106.864.200,00		81,30
		<i>Jumlah Dokumen Regulasi dan/atau Kebijakan</i>	150,00		150,00		100,00	
		<i>Jumlah Peserta Pelatihan dan/atau Sosialisasi</i>	150,00		150,00		100,00	
		<i>Jumlah Regulasi dan/atau Kebijakan yang Diterbitkan</i>	1,00		1,00		100,00	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			7.722.200,00		3.668.200,00		47,50
		<i>Jumlah Dokumen potensi PAD, Bagi Hasil Provinsi dan dana Transfer</i>	6,00		6,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Peserta Rapat Pembahasan</i>	30,00		15,00		50,00	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			3.065.000,00		3.065.000,00		100,00
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>	4,00		4,00		100,00	
		<i>Jumlah Peserta Rapat Pembahasan</i>	80,00		80,00		100,00	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			0,00		0,00		0,00
		<i>Jumlah Dokumen Kegiatan</i>	4,00		0,00		0,00	
		<i>Jumlah Peserta Rapat Pembahasan</i>	30,00		0,00		0,00	
		<i>Outcome (2) : Outcome (2) : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah</i>	100,00	538.649.050,00	100,00	404.061.250,00	100,00	75,03
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			538.649.050,00		404.061.250,00		75,03



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	1,00		1,00		100,00	
	Sub Kegiatan :							
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			538.649.050,00		404.061.250,00		75,03
		<i>Jumlah Dokumen Standar Biaya Belanja Daerah</i>	106,00		106,00		100,00	
		<i>Jumlah Tim Penyusun Standar Biaya Belanja Daerah</i>	45,00		45,00		100,00	
		<i>Jumlah Peserta Sosialisasi Pedum APBD</i>	150,00		150,00		100,00	
		<i>Jumlah Dokumen Regulasi dan/atau Kebijakan tentang Pedoman Penyusunan APBD</i>	150,00		150,00		100,00	
		<i>Jumlah Tim Anggaran Pemerintah Daerah</i>	45,00		45,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah Peserta Sosialisasi ASB	106,00		106,00		100,00	
		(IKK/IKU) (2)- Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD	100,00		100,00		100,00	
		Outcome (3) : Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	100,00	1.310.984.260,00	100,00	1.194.109.182,00	100,00	91,08
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.310.984.260,00		1.194.109.182,00		91,08
		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,00		1,00		100,00	
	Sub Kegiatan :							
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			237.268.700,00		207.412.020,00		87,42



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS</i>	2,00		2,00		100,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD			231.336.080,00		216.028.710,00		93,38
		<i>Jumlah Dokumen RKPA SKPD/PPK D</i>	74,00		74,00		100,00	
		<i>Jumlah Dokumen RKPA SKPD/PPK D Mendahului RKPA Perubahan Reguler</i>	104,00		104,00		100,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD			178.300.100,00		128.376.682,00		72,00
		<i>Jumlah Dokumen DPPA SKPD/PPK D</i>	375,00		375,00		100,00	
		<i>Jumlah Dokumen DPPA SKPD/PPK D Mendahului DPPA Perubahan Reguler</i>	104,00		104,00		100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			664.079.380,00		642.291.770,00		96,72



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah Dokumen Nota Keuangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	20,00		20,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	20,00		20,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD	50,00		50,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	50,00		50,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD	50,00		50,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	20,00		20,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	50,00		50,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD	20,00		20,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	20,00		20,00		100,00	
BIDANG PERBENDAHARAAN								



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>(IKK/IKU) (3)- Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata- rata penyelesaian SP2D</i>	100,00		100,00		100,00	
		<i>Outcome (4) : Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran</i>	100,00	1.090.852.500,00	100,00	1.047.378.438,00	100,00	97,02
2.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1.090.852.500,00		1.047.378.438,00		97,02
		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	1,00		1,00		100,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			143.801.370,00		142.765.370,00		99,56
		<i>Terkoordinasinya Pengelolaan Kas Daerah</i>	4,00		4,00		100,00	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			191.546.540		186.488.800,00		97,36
		<i>Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD</i>	444,00		444,00		100,00	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah			69.962.700,00		69.957.700,00		99,99



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang disajikan secara tepat waktu</i>	2,00		2,00		100,00	
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			52.187.490,00		50.405.545,00		96,59
		<i>Jumlah dokumen Pelaporan DAU, DAK, BOK, DID, DBH, Bantuan Provinsi</i>	6,00		6,00		100,00	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			207.002.120,00		205.279.324,00		99,17
		<i>Jumlah Cetak SP2D yang diselesaikan</i>	4,00		4,00		100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan			78.289.200,00		53.576.851,00		68,43



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Fihak Ketiga (PFK)							
		<i>Terkoordinasi a Penyusunan Laporan Pemungutan dan Penyetoran Perhitungan PFK</i>	<i>3,00</i>		<i>3,00</i>		<i>100,00</i>	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas			114.718.180,00		113.921.080,00		99,31
		<i>Jumlah Laporan Piutang dan Utang Daerah</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>		<i>100,00</i>	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait			233.744.900,00		224.983.768,00		96,25



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Dokumen rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan SKPD</i>	<i>876,00</i>		<i>876,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Outcome (5) : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola keuangan daerah</i>	<i>100,00</i>	<i>483.416.900,00</i>	<i>100,00</i>	<i>479.931.140,00</i>	<i>100,00</i>	<i>99,28</i>
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			483.416.900,00		479.931.140,00		99,28
		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		<i>100,00</i>	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			<i>483.416.900,00</i>		<i>479.931.140,00</i>		<i>99,28</i>
		<i>Jumlah peserta pelatihan pengelolaan keuangan pada SKPD</i>	<i>222,00</i>		<i>222,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Update Data Gaji PNS Daerah</i>	<i>14,00</i>		<i>14,00</i>		<i>100,00</i>	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		(IKK/IKU) (4)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya	100,00		100,00		100,00	
		Outcome (6) : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap	100,00	1.433.783.460,00	90,91	1.367.903.472,00	90,91	95,41
		(IKK/IKU) (5)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP	100,00		100,00		100,00	
		Outcome (6) : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP	100,00	1.433.783.460,00	100,00	1.367.903.472,00	100,00	95,41
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.433.783.460,00		1.367.903.472,00		95,41



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	1,00		1,00		100,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			41.557.980,00		41.308.038,00		99,40
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Kas Pemerintah daerah yang diselesaikan</i>	3,00		3,00		100,00	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban			253.532.690,00		240.345.984,00		94,80
		<i>Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan</i>	20,00		20,00		100,00	
		<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi</i>	876,00		876,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			106.311.450,00		102.858.800,00		96,75
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Daerah yang Diselesaikan</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>		<i>100,00</i>	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			357.999.740		344.219.450,00		96,15
		<i>Jumlah Dokumen LKPD Unaudited dan Audited yang Diselesaikan</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>		<i>100,00</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			109.797.300		96.183.400,00		87,60



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>		<i>100,00</i>	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			27.459.500		27.443.500,00		99,94
		<i>Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		<i>100,00</i>	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			156.807.000		141.033.700,00		89,94
		<i>Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>		<i>100,00</i>	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah			380.317.800		374.510.600,00		98,47



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Daerah							
		<i>Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	2,00		2,00		100,00	
		<i>Jumlah Jenis Software Pengembangan Aplikasi SIPKD yang Terintegrasi dan Handal</i>	1,00		1,00		100,00	
		<i>Outcome (7) : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan daerah</i>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			0,00		0,00		0,00
		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	1,00		0,00		0,00	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		0,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Peraturan yang disosialisasikan</i>	<i>4,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
JUMLAH				6.167.020.320		5.551.208.107		90,01

Tabel. 6

- Misi** : Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah
- Tujuan** : Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		%
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan				
	IKK/IKU) -Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi (Non Kumulatif)	69,78 Prosen	53,25 Prosen	76,31 Prosen
	(IKK/IKU) -Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen



	(Non Kumulatif)			
Rata – Rata				88,16%

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran **meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan** dengan 2 (dua) indikator kinerja utama menunjukkan pada Tahun 2021 nilai capaian 2 (dua) indikator kinerja utama dengan nilai capaian sebesar 88,16% atau predikat **berhasil**, dengan uraian pencapaian indikator kinerja 5 (lima) tahun sesuai Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024. Sebagai upaya mencapai misi, tujuan dan sasaran ini maka Badan Keuangan dan Aset Daerah menuangkan 1 (satu) program 1 (satu) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 6.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pencapaian Sasaran **Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah
Sesuai Peraturan Perundangan**

No.	BIDANG/PROGR AM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		(IKK/IKU) (6)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya	100,00		100,00		100,00	
		(IKK/IKU) (7)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya	100,00		100,00		100,00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		100,00	2.623.229.825,00	65,92	2.267.804.206,00	65,92	86,45
		Outcome (1) : Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar	100,00	1.063.899.496,00	100,00	1.755.782.339,00	100,00	94,97
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.063.899.496,00		1.755.782.339,00		94,97



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	1,00		1,00		100,00	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			124.249.800,00		122.286.200,00		98,42
		<i>Jumlah Dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	73,00		73,00		100,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			85.641.400,00		74.829.984,00		87,38
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan Pengelola Barang yang Diselesaikan</i>	74,00		74,00		100,00	
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pemeliharaan/P erawatan Barang Milik Daerah SKPD dan Pengelola Barang yang Diselesaikan</i>	74,00		74,00		100,00	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			79.112.700,00		73.214.700,00		92,54



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati tentang Barang Milik Daerah	85,00		85,00		100,00	
		Jumlah Dokumen Peraturan Bupati/Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah	85,00		85,00		100,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah			443.832.900,00		432.642.776,00		97,48
		Jumlah SKPD yang Melakukan Penatausahaan BMD Sesuai dengan Aturan	74,00		74,00		100,00	
		Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah yang Dikembangkan	1,00		1,00		100,00	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah			102.149.550,00		92.399.913,00		90,46
		Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris SKPD dan Pengelola Barang	74,00		74,00		100,00	
	Penilaian Barang Milik Daerah			635.491.370,00		606.169.868,00		95,39



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Dokumen Hasil Proses Nilai Taksir/Appraisal Barang Milik Daerah yang Akan Dihapuskan, Dipindahtanganan dan atau Disewakan</i>	<i>5,00</i>		<i>5,00</i>		<i>100,00</i>	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			191.033.320,00		184.367.714.00		96,51
		<i>Jumlah Dokumen Administrasi Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah SKPD yang Diselesaikan</i>	<i>73,00</i>		<i>73,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah dokumen penetapan status penggunaan BMD dan persetujuan pengalihan status penggunaan BMD</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah dokumen pemindahtanganan BMD</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah dokumen pemusnahan BMD</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		<i>100,00</i>	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah dokumen penghapusan BMD</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		<i>100,00</i>	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			131.271.925,00		120.860.984,00		92,07
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Tahunan dan Semesteran yang Diselesaikan</i>	<i>2,00</i>		<i>2,00</i>		<i>100,00</i>	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			55.996.200,00		49.010.200,00		87,52
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Neraca Aset/Barang Daerah yang Diyakini Kewajarannya</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Outcome (2) : Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola barang daerah</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Pengelolaan Barang Milik Daerah			0,00		0,00		0,00
		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>1,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		0,00
		<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>164,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
		<i>Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD</i>	<i>200,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
C.	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan			774.450.660,00		512.021.867,00		66,11
		<i>(IKK/IKU) (8)- Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi</i>	<i>69,78</i>		<i>53,25</i>		<i>76,31</i>	
		<i>Outcome (3) : Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik/benar</i>	<i>100,00</i>	<i>774.450.660,00</i>	<i>97,76</i>	<i>512.021.867,00</i>	<i>97,76</i>	<i>66,11</i>
	Pengelolaan Barang Milik Daerah			774.450.660,00		512.021.867,00		66,11



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	1,00		1,00		100,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah			687.633.075,00		429.103.683,00		62,40
		<i>Jumlah Penyelesaian/Penuntutan Penggantian kepada Pihak yang Menyebabkan Kerugian Daerah</i>	83,00		83,00		100,00	
		<i>Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Diasuransikan</i>	58,00		58,00		100,00	
		<i>Jumlah Gedung Bangunan Milik Daerah yang Diasuransikan</i>	50,00		50,00		100,00	
		<i>Jumlah Bidang Tanah Milik Daerah yang Telah dan atau Sedang Proses Sertifikasi</i>	125,00		97,00		77,60	
		<i>Jumlah Kendaraan Roda Empat Milik Daerah yang Dibranding</i>	20,00		20,00		100,00	
		<i>Jumlah Patok Batas yang Terpasang</i>	20,00		20,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Jumlah Plang Kepemilikan Tanah Milik Daerah	10,00		10,00		100,00	
		Jumlah Bidang Tanah Milik Daerah yang Lunas Bayar SPPT PBB	60,00		60,00		100,00	
		Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Milik Daerah yang Telah Melakukan Daftar Ulang	60,00		60,00		60,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah SKPD yang Diselesaikan	73,00		73,00		100,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			86.817.585,00		82.918.184,00		95,51
		Jumlah Bidang Tanah yang Diusahakan/Diselesaikan	13,00		13,00		100,00	
JUMLAH				2.571.666.825		2.215.904.968		86,17

Tabel. 7

Misi : Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah

Tujuan : Terwujudnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan dan



Aset Daerah yang Profesional dan Kompeten

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		%
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah				
	(IKK/IKU)-Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah (Non Kumulatif)	80 Prosen	80 Prosen	100 Prosen
Rata - Rata				100 %

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran **meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama menunjukkan pada Tahun 2021 nilai capaian 1 (satu) indikator kinerja utama dengan nilai capaian sebesar 100% atau predikat **sangat berhasil**, dengan uraian pencapaian indikator kinerja 5 (lima) tahun sesuai Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024. Sebagai upaya mencapai misi, tujuan dan sasaran ini maka Badan Keuangan dan Aset Daerah menuangkan 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 7.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pencapaian Sasaran **Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

No.	BIDANG/PROGR AM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	SEKRETARIAT							



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

A.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah			9.995.352.510,00		9.274.992.148,00		92,79
		(IKK/IKU)- Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	80,00		80,00		100,00	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100,00	9.995.352.510,00	93,64	9.274.992.148,00	93,64	92,79
		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,00	148.778.770,00	100,00	146.746.150,00	100,00	98,63



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,00	251.222.030,00	81,82	225.964.251,00	81,82	89,95
		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,00	7.426.143.000,00	100,00	6.882.107.191,00	100,00	92,67
		Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100,00	37.425.000,00	100,00	31.050.000,00	100,00	83,64



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah</i>	100,00	1.089.821.960,00	100,00	1.019.982.809,00	100,00	93,59
		<i>Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD</i>	100,00	1.042.261.750,00	80,00	969.141.747,00	80,00	92,98
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			148.778.770,00		146.746.150,00		98,63
		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	1,00		1,00		100,00	
	Sub Kegiatan :							



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.712.150,00		11.680.400,00		99,73
		<i>Jumlah Dokumen Renstra, Review Renstra, Renja dan Perubahan RenjaSKPD yang Diselesaikan</i>	<i>4,00</i>		<i>4,00</i>		<i>100,00</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD			5.321.830,00		5.273.700,00		99,10
		<i>Jumlah Dokumen Pra RKA, RKA Hantaran, RKAPersetujuan dan RKA Penetapan SKPD yang diselesaikan</i>	<i>4,00</i>		<i>4,00</i>		<i>100,00</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			5.321.830,00		5.273.700,00		99,10
		<i>Jumlah Dokumen RKAP Hantaran, RKAP Persetujuan, RKAP Penetapan dan RKAP Parsial SKPD yang diselesaikan</i>	<i>4,00</i>		<i>4,00</i>		<i>100,00</i>	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD			3.583.770,00		3.555.900,00		99,20



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD yang diselesaikan</i>	1,00		1,00		100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD			3.918.460,00		3.886.700,00		99,19
		<i>Jumlah Dokumen DPAP Parsial dan DPAP Reguler SKPD yang diselesaikan</i>	2,00		2,00		100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.959.220,00		5.958.400,00		99,99
		<i>Jumlah laporan capaian kinerja kegiatan, program, sasaran bulanan dan triwulanan SKPD yang diselesaikan</i>	4,00		4,00		100,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			112.961.510,00		111.117.350,00		98,37
		<i>Jumlah Dokumen LKPJ/LPPD, LKIP, IKU Perkin, RKT, PMPR B, SPIP, SP/IKM dan Renaksi KPK SKPD yang diselesaikan</i>	8,00		8,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Sertifikat ISO yang Diperoleh Terhadap SOP atau Jenis Pelayanan yang Dijamin</i>	1,00		1,00		100,00	
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.442.772.570,00		6.898.534.991,00		92,69
		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan</i>	1,00		1,00		100,00	
	Sub Kegiatan :							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.426.143.000,00		6.882.107.191,00		92,67
		<i>Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangan lainnya setiap bulan</i>	50,00		50,00		100,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.998.070,00		1.927.700,00		96,48
		<i>Jumlah dokumen pengajuan SPP dan penerbitan SPMUP, LS, GU/TU serta gaji yang dicek kelengkapannya</i>	4,00		4,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah dokumen SPJ BP/BPP SKPD yang telah diverifikasi dan disahkan</i>	6,00		6,00		100,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			2.325.760,00		2.255.600,00		96,98
		<i>Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD (Neraca, LO, LPE dan BAR Validasi Akun)</i>	4,00		4,00		100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			9.852.900,00		9.803.800,00		99,50
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Diselesaikan</i>	1,00		1,00		100,00	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00		0,00		0,00
		<i>Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari auditor internal dan eksternal yang telah diterima oleh SKPD</i>	2,00		0,00		0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			2.452.840,00		2.440.700,00		99,51



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang Diselesaikan</i>	1,00		1,00		100,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		0,00		0,00
	<i>Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang Diselesaikan</i>	<i>Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang Diselesaikan</i>	1,00		0,00		0,00	
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			234.592.460,00		209.536.451,00		89,32
		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah</i>	1,00		1,00		100,00	
	Sub Kegiatan :							
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1.094.260,00		1.081.850,00		98,87
		<i>Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	1,00		1,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		SKPD yang telah diselesaikan						
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			230.500.000,00		205.500.001,00		89,15
		Jumlah Tenaga Keamanan/ Sekuriti	3,00		3,00		100,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.499.650,00		1.468.700,00		97,94
		Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah dengan fungsi akuntansi terkait pemeliharaan dan pengadaan barang	2,00		2,00		100,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.498.550,00		1.485.900,00		99,16
		Jumlah dokumen laporan untuk pengadaan barang inventaris dan pemeliharaan dalam triwulan/ semester/ tahun	2,00		2,00		100,00	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			37.125.000,00		31.050.000,00		83,64



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian</i>	1,00		1,00		100,00	
	Sub Kegiatan :							
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			37.125.000,00		31.050.000,00		83,64
		<i>Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan</i>	0,00		0,00		0,00	
		<i>Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Disediakan</i>	70,00		70,00		100,00	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.089.821.960,00		1.019.982.809,00		93,59
		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum</i>	1,00		1,00		100,00	
	Sub Kegiatan :							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.967.760,00		25.965.900,00		99,99



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Pener- anganBang- unan Kantor yang Dibutuhkan</i>	17,00		17,00		100,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			320.592.600,00		271.315.000,00		84,63
		<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkap- an Kantor yang Dibutuhkan</i>	12,00		12,00		100,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			276.116.500,00		270.961.100,00		98,13
		<i>Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Perkantoran yang Tersedia</i>	20,00		20,00		100,00	
		<i>Jumlah Tenaga Kebersihan</i>	3,00		3,00		100,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20.720.000,00		20.720.000,00		100,00
		<i>Jumlah jenis kebutuhan makan dan minum rapat pegawai yang tersedia</i>	2,00		2,00		100,00	
	Penyediaan Barang Cetak- an dan Penggandaan			50.401.450,00		46.583.900,00		92,43
		<i>Jumlah Barang Cetakan yang Dibutuhkan</i>	17,00		17,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Penggandaan yang Dibutuhkan</i>	17,00		17,00		100,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		92.100.000,00		92.100.000,00		100,00
		<i>Jumlah Penayangan Iklan di Media Masa/Elektronik</i>	23,00		23,00		100,00	
		<i>Jumlah Surat Kabar/Koran yang Dibutuhkan</i>	7,00		7,00		100,00	
	Penyediaan Bahan/Material			70.887.300,00		70.804.450,00		99,88
		<i>Jumlah ATK yang tersedia</i>	67,00		67,00		100,00	
	Fasilitas Kunjungan Tamu			14.880.000,00		12.604.500,00		84,71
		<i>Jumlah Kunjungan Tamu Kedinasan dari Instansi Pemerintah dan NonPemerintah Lainnya yang Berkunjung/Konsultasi/Koordinasi</i>	22,00		22,00		100,00	
		<i>Jumlah Tamu Kedinasan dari Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah Lainnya yang Berkunjung/Konsultasi/Koordinasi</i>	220,00		220,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			66.168.500,00		57.145.880,00		86,36
		<i>Jumlah Aparatur yang Mengikuti dan Memenuhi Undangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i>	<i>60,00</i>		<i>60,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Undangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i>	<i>20,00</i>		<i>20,00</i>		<i>100,00</i>	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			151.987.850,00		151.782.079,00		99,86
		<i>Jumlah Dokumen yang Telah Dikelola dan Diarsipkan</i>	<i>296,00</i>		<i>296,00</i>		<i>100,00</i>	
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00		0,00		0,00
		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</i>	<i>1,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Daerah</i>						
	Sub Kegiatan :							
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00		0,00		0,00
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua yang Disediakan</i>	<i>1,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat yang Disediakan</i>	<i>1,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			624.282.450,00		575.904.364,00		92,25
		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		<i>100,00</i>	
	Sub Kegiatan :							



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			290.520.000,00		249.191.438,00		85,77
		<i>Jumlah Jenis Tagihan Rekening</i>	<i>3,00</i>		<i>3,00</i>		<i>100,00</i>	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			333.762.450,00		326.712.926,00		97,89
		<i>Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Terpelihara</i>	<i>11,00</i>		<i>11,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara dengan Baik dan Siap Pakai</i>	<i>22,00</i>		<i>22,00</i>		<i>100,00</i>	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			417.979.300,00		393.237.383,00		94,08
		<i>Berita Acara Review internal SKPD terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>		<i>100,00</i>	
	Sub Kegiatan :							



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			131.540.000,00		124.128.588,00		94,37
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai</i>	<i>11,00</i>		<i>11,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai</i>	<i>5,00</i>		<i>5,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Kendaraan Roda Dua Dinas Jabatan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya</i>	<i>11,00</i>		<i>11,00</i>		<i>100,00</i>	
		<i>Jumlah Kendaraan Roda Empat Dinas Jabatan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya</i>	<i>5,00</i>		<i>5,00</i>		<i>100,00</i>	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		ya						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			26.905.000,00		26.333.300,00		97,88
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai	22,00		22,00		100,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai	5,00		5,00		100,00	
		Jumlah Kendaraan Roda Dua Dinas Operasional atau Lapangan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraan atau Diperpanjang STNK Kendaraan ya	22,00		22,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		<i>Jumlah Kendaraan Roda Empat Dinas Operasional atau Lapangan anyang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya</i>	5,00		5,00		100,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			16.362.750,00		0,00		0,00
		<i>Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi</i>	2,00		0,00		0,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			243.171.550,00		242.775.495,00		99,84
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik (Kondisi Aman dan Nyaman) dan Layak Ditempati</i>	5,00		5,00		100,00	
JUMLAH				9.995.352.510		9.274.992.148		92,79



Keberhasilan maupun kegagalan dalam memenuhi capaian kinerja baik sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan selama Tahun 2021 dan solusi pemecahannya sebagai berikut :

1. Dampak dari pandemi covid 19 dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat terasa dalam memenuhi target dan realisasi capaian kinerja dan anggaran sehingga banyak sekali program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terjadwal ulang lagi. Apabila dicapai maka akan ada inefisiensi anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Dokumen kepemilikan awal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Cirebon kurang/tidak lengkap sehingga dalam memenuhi target capaian pensertifikatan Tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon kurang maksimal. Solusi untuk mengatasi hal tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah akan melakukan koordinasi dengan pihak desa/kelurahan dan SKPD untuk melakukan verifikasi ulang lagi di lapangan.

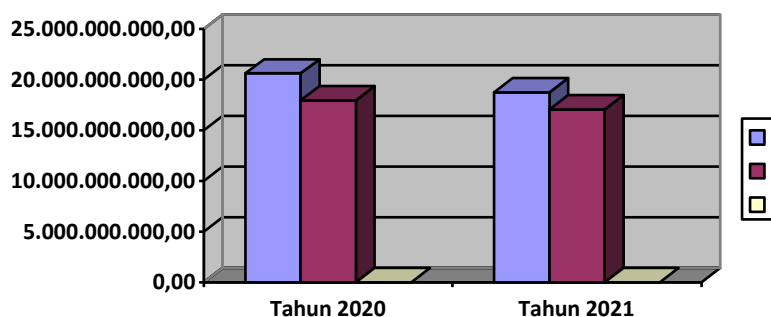
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Pagu anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 sebesar Rp.18.734.039.655,00 (*Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 17.042.105.223,00 (*Tujuh Belas Milyar Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), atau 90,97 %.



Tabel. 8
Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Triwulan III
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2020 dengan Tahun 2021

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	20.594.789.200,00	18.734.039.655,00
Realisasi	17.943.595.390,00	17.042.105.223,00
Prosentase (%)	87,13	90,97



Jika dibandingkan dengan anggaran Tahun 2020 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah mengalami kenaikan dan capaian penyerapannya lebih besar.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 - 2024, telah ditentukan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek dan dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi melalui penentuan program, yaitu penjabaran dalam bentuk upaya yg berisi satu atau lebih beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi



Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pengukuran capaian program dengan menggunakan indikator program yaitu ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Berikut ini pengukuran capaian program sampai dengan Tahun 2021 :

Tabel. 9
Capaian Program dan Anggaran
Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Tahun 2021

Sasaran	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan
	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah
Strategi	Menjaga konsistensi/keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran (RPJMD, Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA/RKPA dan DPA/DPPA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
	Mengoptimalkan fungsi teknologi informasi secara online dan berbasis web
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung program kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah
	Melakukan update aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang
	Melakukan pembinaan/sosialisasi bagi pegawai diseluruh SKPD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah
	Melakukan pengelolaan administrasi kas berupa penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana serta penerbitan SP2D bagi SKPD se Kab. Cirebon
	Melakukan rekonsiliasi secara langsung dan monitoring/evaluasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada SKPD
	Melakukan inventarisasi dan pemetaan aset daerah
	Melakukan inventarisasi dan penerapan SOP, standar pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi/aplikasi yang terintegrasi, dan penerapan citizen charter/maklumat pelayanan serta perjanjian kinerja menuju kawasan bebas korupsi
	Peningkatan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
	Peningkatan pengelolaan dan pengolahan data base keuangan dan barang daerah
Kebijakan	Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana yang ada guna menunjang program dan kegiatan yang telah ditetapkan
	Peningkatan aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan melakukan pemeliharaan secara berkala
	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah dengan melaksanakan pembinaan/sosialisasi secara berkala



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran
	Penyusunan laporan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual
	Peningkatan validasi pengelolaan data aset
	Peningkatan standar kualitas pelayanan BKAD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan

No	Kode	Nama Program Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Outcome		Rasio (%)
				Bulan ini	s/d Bulan ini	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.995.352.510	1.629.197.804	9.274.992.148	92,79
		Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	100,00	100,00	100,00
		Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	80,00	80,00	80,00
		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	81,82	81,82	81,82
		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	100,00	100,00	100,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	100,00	100,00	100,00
		Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	100,00	100,00	100,00
2	5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.115.457.320	1.162.209.846	5.499.308.869	89,92
		Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan daerah	100 Prosen	100,00	100,00	100,00
		Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD	100 Prosen	87,50	87,50	87,50
		Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	100 Prosen	100,00	100,00	100,00
		Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran	100 Prosen	100,00	100,00	100,00
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan dan laporan aset	100 Prosen	100,00	100,00	100,00
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP	100 Prosen	100,00	100,00	100,00
3	5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.623.229.825	938.737.839	2.267.804.206	86,45



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik/benar	100 Prosen	97,76	97,76	97,76
		Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD	100 Prosen	87,50	87,50	87,50
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap	100 Prosen	100,00	100,00	100,00
		Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar	100 Prosen	100,00	100,00	100,00
		Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola barang daerah	100 Prosen	0,00	0,00	0,00
JUMLAH			18.734.039.655	17.042.105.223	1.691.934.432	90,97

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian indikator program Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan sudah tercapai seluruhnya. Namun demikian dari 3 (tiga) program dengan target indikator program sebanyak 17 (tujuh belas) indikator, tercapai 11 (sebelas) dan belum tercapai 6 (enam) indikator.

Berikut tabel di bawah ini menunjukkan besaran alokasi anggaran pencapaian sasaran strategis pada Badan Keuangan dan Aset Daerah terhadap total anggaran per indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sampai dengan Tahun 2021.



Tabel. 10
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Tahun 2021

No.	BIDANG/PROGR AM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
A.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah			9.995.352.510,00		9.274.992.148,00		92,79
		<i>(IKK/IKU)- Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah</i>	80,00		80,00		100,00	
B.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah			6.167.020.320,00		5.551.208.107,00		90,01
		<i>(IKK/IKU) (1)- Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD</i>	100,00		100,00		100,00	
		<i>(IKK/IKU) (2)- Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD</i>	100,00		100,00		100,00	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		(IKK/IKU) (3)- Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata- rata penyelesaian SP2D	100,00		100,00		100,00	
		(IKK/IKU) (4)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya	100,00		100,00		100,00	
		(IKK/IKU) (5)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP	100,00		100,00		100,00	
C.	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan			2.571.666.825,00		2.215.904.968,00		86,17
		(IKK/IKU) (6)- Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi	69,78		53,25		76,31	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

		(IKK/IKU) (7)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya	100,00		100,00		100,00	
JUMLAH				18.734.039.655,00		17.042.105.223,00		90,97

Tabel berikut ini menyajikan data pencapaian kinerja terhadap anggaran Tahun 2021

Tabel. 10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tahun 2021

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	(%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Sasaran : Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah					9.995.352.510	9.274.992.148	92,79
	(IKK/IKU)- Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	80,00	80,00	100,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	100,00	100,00			
	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung	100 Prosen	80,00	80,00			



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah						
	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	81,82	81,82			
	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	100,00	100,00			
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	100,00	100,00			
	Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 Prosen	100,00	100,00			
Rata - Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Per Sasaran				93,64	9.995.352.510	9.274.992.148	92,79



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

Sasaran : Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah					6.167.020.320	5.551.208.107	90,01
	<i>(IKK/IKU) (1)- Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD</i>	100	100,00	100,00			
	<i>(IKK/IKU) (2)- Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD</i>	100	100,00	100,00			
	<i>(IKK/IKU) (3)- Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D</i>	100	100,00	100,00			
	<i>(IKK/IKU) (4)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajaran nya</i>	100	100,00	100,00			
	<i>(IKK/IKU) (5)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP</i>	100	100,00	100,00			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan daerah	100 Prosen	100,00	100,00			
	Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD	100 Prosen	87,50	87,50			
	Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	100 Prosen	100,00	100,00			



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran	100 Prosen	100,00	100,00			
	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan dan laporan aset	100 Prosen	100,00	100,00			
	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP	100 Prosen	100,00	100,00			
Rata - Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Per Sasaran				97,92	6.167.020.320	5.551.208.107	90,01
Sasaran : Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan					2.571.666.825	2.215.904.968	86,17
	(IKK/IKU) (6)- Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi	69,78	53,25	76,31			
	(IKK/IKU) (7)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya	100	100,00	100,00			
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik/benar	100 Prosen	97,76	97,76			
	Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD	100 Prosen	87,50	87,50			



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar	100 Prosen	100,00	100,00			
	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap	100 Prosen	100,00	100,00			
	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola barang daerah	100 Prosen	100,00	100,00			
Rata - Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Per Sasaran				97,05	2.571.666.825	2.215.904.968	86,17
Total Rata - Rata				96,20	18.734.039.655	17.042.105.223	90,97

Dari tabel diatas terlihat bahwa sampai dengan Tahun 2021 capaian anggaran masing-masing capaian sasaran rata-rata sebesar 90,97 % dengan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 96,20 % dengan kategori “Cukup Berhasil”. Tabel berikut adalah penyampaian tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang tersedia untuk pencapaian target kinerja sasaran.



Tabel. 11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sampai Dengan Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	(IKK/IKU)- Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah (Non Kumulatif)	93,64	92,79	99,09
2	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	(IKK/IKU)- Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya (Non Kumulatif)	97,92	90,01	91,92
		(IKK/IKU)- Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD (Non Kumulatif)			
		(IKK/IKU)- Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD (Non Kumulatif)			
		IKK/IKU)- Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-			



		rata penyelesaian SP2D (Non Kumulatif)			
		(IKK/IKU) - Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP (Non Kumulatif)			
3	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	(IKK/IKU) - Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi (Non Kumulatif)	97,05	86,17	88,79
		(IKK/IKU) - Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya (Non Kumulatif)			
Rata - Rata			96,20%	90,97%	94,56%

Tabel. 11 menunjukkan tingkat efisiensi atas penggunaan sumberdaya pencapaian sebesar 96,20%, dimana dengan capaian serapan anggaran sebesar 90,97% namun capaian indikator kinerjanya mencapai 94,56%.

**B. Realisasi Anggaran Tahun 2021**

Pada sub bab ini diuraikan capaian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 12
Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2021

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	% Real Anggaran
BELANJA DAERAH	18.734.039.655,00	17.042.105.223,00	1.691.934.432,00	90,97%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.115.457.320,00	5.499.308.869,00	616.148.451,00	89,92%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.107.404.460,00	2.604.095.819,00	503.308.641,00	83,80%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	260.873.950,00	218.646.000,00	42.227.950,00	83,81%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	237.268.700,00	207.412.020,00	29.856.680,00	87,42%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	192.549.600,00	172.769.400,00	19.780.200,00	89,73%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	231.336.080,00	216.028.710,00	15.307.370,00	93,38%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	37.194.300,00	33.513.800,00	3.680.500,00	90,10%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	178.300.100,00	128.376.682,00	49.923.418,00	72,00%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	624.997.900,00	467.398.787,00	157.599.113,00	74,78%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	664.079.380,00	642.291.770,00	21.787.610,00	96,72%
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	131.450.200,00	106.864.200,00	24.586.000,00	81,30%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	7.722.200,00	3.668.200,00	4.054.000,00	47,50%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3.065.000,00	3.065.000,00	-	100,00%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	-	-	-	#DIV/0!
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	538.567.050,00	404.061.250,00	134.505.800,00	75,03%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.574.269.400,00	1.527.309.578,00	46.959.822,00	97,02%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	143.401.370,00	142.765.370,00	636.000,00	99,56%
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	191.546.540,00	186.488.800,00	5.057.740,00	97,36%
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	69.962.700,00	69.957.700,00	5.000,00	99,99%
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	52.187.490,00	50.405.545,00	1.781.945,00	96,59%
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	207.002.120,00	205.279.324,00	1.722.796,00	99,17%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	78.289.200,00	53.576.851,00	24.712.349,00	68,43%
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	114.718.180,00	113.921.080,00	797.100,00	99,31%
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	233.744.900,00	224.983.768,00	8.761.132,00	96,25%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	483.416.900,00	479.931.140,00	3.485.760,00	99,28%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.433.783.460,00	1.367.903.472,00	65.879.988,00	95,41%
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	41.557.980,00	41.308.038,00	249.942,00	99,40%
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	253.532.690,00	240.345.984,00	13.186.706,00	94,80%
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	106.311.450,00	102.858.800,00	3.452.650,00	96,75%
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	357.999.740,00	344.219.450,00	13.780.290,00	96,15%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	109.797.300,00	96.183.400,00	13.613.900,00	87,60%
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	27.459.500,00	27.443.500,00	16.000,00	99,94%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	156.807.000,00	141.033.700,00	15.773.300,00	89,94%
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	380.317.800,00	374.510.600,00	5.807.200,00	98,47%
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	#DIV/0!
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.623.229.825,00	2.267.804.206,00	355.425.619,00	86,45%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.623.229.825,00	2.267.804.206,00	355.425.619,00	86,45%
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	124.249.800,00	122.286.200,00	1.963.600,00	98,42%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	85.641.400,00	74.829.984,00	10.811.416,00	87,38%
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	79.112.700,00	73.214.700,00	5.898.000,00	92,54%
Penatausahaan Barang Milik Daerah	443.832.900,00	432.642.776,00	11.190.124,00	97,48%
Inventarisasi Barang Milik Daerah	102.149.550,00	92.399.913,00	9.749.637,00	90,46%
Pengamanan Barang Milik Daerah	687.633.075,00	429.103.683,00	258.529.392,00	62,40%
Penilaian Barang Milik Daerah	635.491.370,00	606.169.868,00	29.321.502,00	95,39%
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	86.817.585,00	82.918.184,00	3.899.401,00	95,51%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	191.033.320,00	184.367.714,00	6.665.606,00	96,51%
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	131.271.925,00	120.860.984,00	10.410.941,00	92,07%
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	55.996.200,00	49.010.200,00	6.986.000,00	87,52%
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	#DIV/0!
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.995.352.510,00	9.274.992.148,00	720.360.362,00	92,79%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.778.770,00	146.746.150,00	2.032.620,00	98,63%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.712.150,00	11.680.400,00	31.750,00	99,73%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.321.830,00	5.273.700,00	48.130,00	99,10%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.321.830,00	5.273.700,00	48.130,00	99,10%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.583.770,00	3.555.900,00	27.870,00	99,22%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.918.460,00	3.886.700,00	31.760,00	99,19%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.959.220,00	5.958.400,00	820,00	99,99%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.961.510,00	111.117.350,00	1.844.160,00	98,37%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.442.772.570,00	6.898.534.991,00	544.237.579,00	92,69%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.426.143.000,00	6.882.107.191,00	544.035.809,00	92,67%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.998.070,00	1.927.700,00	70.370,00	96,48%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.325.760,00	2.255.600,00	70.160,00	96,98%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.852.900,00	9.803.800,00	49.100,00	99,50%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.452.840,00	2.440.700,00	12.140,00	99,51%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	#DIV/0!
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	234.592.460,00	209.536.451,00	25.056.009,00	89,32%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.094.260,00	1.081.850,00	12.410,00	98,87%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	230.500.000,00	205.500.001,00	24.999.999,00	89,15%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.499.650,00	1.468.700,00	30.950,00	97,94%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.498.550,00	1.485.900,00	12.650,00	99,16%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.125.000,00	31.050.000,00	6.075.000,00	83,64%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.125.000,00	31.050.000,00	6.075.000,00	83,64%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	#DIV/0!
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.089.821.960,00	1.019.982.809,00	69.839.151,00	93,59%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.967.760,00	25.965.900,00	1.860,00	99,99%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	320.592.600,00	271.315.000,00	49.277.600,00	84,63%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	276.116.500,00	270.961.100,00	5.155.400,00	98,13%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.720.000,00	20.720.000,00	-	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.401.450,00	46.583.900,00	3.817.550,00	92,43%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	92.100.000,00	92.100.000,00	-	100,00%
Penyediaan Bahan/Material	70.887.300,00	70.804.450,00	82,85	99,88%
Fasilitasi Kunjungan Tamu				84,71%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021

	14.880.000,00	12.604.500,00	2.275.500,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.168.500,00	57.145.880,00	9.022.620,00	86,36%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	151.987.850,00	151.782.079,00	205.771,00	99,86%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	#DIV/0!
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	#DIV/0!
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.282.450,00	575.904.364,00	48.378.086,00	92,25%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.520.000,00	249.191.438,00	41.328.562,00	85,77%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	333.762.450,00	326.712.926,00	7.049.524,00	97,89%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417.979.300,00	393.237.383,00	24.741.917,00	94,08%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131.540.000,00	124.128.588,00	7.411.412,00	94,37%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.905.000,00	26.333.300,00	571.700,00	97,88%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.362.750,00	-	16.362.750,00	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	243.171.550,00	242.775.495,00	396.055,00	99,84%
SURPLUS/(DEFISIT)	18.734.039.655,00	17.042.105.223,00	1.691.934.432,00	90,97%

C. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Adapun faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja selama Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :
 - a. Telah terintegrasinya rekonsiliasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam 1 (satu) aplikasi yaitu SIRAOS;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menjaminkan layanan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sebanyak 14 (empat belas) layanan.
2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
 - a. Dampak dari pandemi covid 19 dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat terasa dalam memenuhi target dan realisasi capaian



kinerja dan anggaran sehingga banyak sekali program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terjadwal ulang lagi terutama pembangunan gudang arsip;

- b. Dokumen kepemilikan awal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Cirebon kurang/tidak lengkap sehingga dalam memenuhi target capaian pensertifikatan Tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon kurang maksimal.

Sedangkan tindak lanjut bagi pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi terhadap capaian indikator dan serapan anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan nanti diusulkan.
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah akan melakukan koordinasi dengan pihak desa/kelurahan dan SKPD untuk melakukan verifikasi ulang lagi di lapangan agar pencapaian pensertifikatan Tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Reviu Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 – 2024.

Mengacu pada 3 (tiga) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 8 (Delapan) indikator kinerja, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja yang tidak berhasil dicapai pada Tahun 2021, yaitu *"Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi"*. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja menunjukkan bahwa target kinerja sasaran yang ditetapkan dikategorikan **"Berhasil"** dicapai karena nilai capaiannya rata-rata mencapai 76,31%. Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian Indikator Kinerja Utama dan/atau Indikator Kinerja Sasaran, pengukuran kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : Capaian Kinerja keuangan dan realisasi penyerapan anggarannya Tahun 2021 adalah sebesar Rp.17.042.105.223,00 (Tujuh Belas Milyar Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau 90,97%.



Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dan agar mencapai kinerja yang lebih baik lagi, maka upaya yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah antara lain : (1) Penguatan kualitas aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjawab tantangan atas perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, tertib administrasi dan pengembangan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah; dan (3) Peningkatan kualitas, tertib administrasi dan pengembangan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah, serta (4) Strategi penguatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan narasumber Pejabat dari Kementerian RI dan/atau Lembaga-Lembaga Negara serta narasumber dari Pemerintah Kota/Kabupaten lainnya yang memiliki prestasi/terobosan atas capaian kinerjanya.

Sebagai sebuah gambaran kinerja yang disampaikan, Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah secara utuh dan terukur. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya. Selain itu adalah pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur sebagai bahan pengukuran capaian kinerja dan keuangan SKPD.



Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah di tahun selanjutnya.

Sumber, Pebruari 2022

KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

HADI SURYANINGRAT, S.Sos.

Pembina

NIP. 19730701 199901 1 001